



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

# LAPORAN KINERJA Tahun 2022



Foto by : BTN Aketajawe Lolobata



Foto by : BTN Aketajawe Lolobata



Foto by : BTN Matawala

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Menghargai Lingkungan • Berkeadilan  
Bersinergi • Berkeadilan • Berkeadilan





**LAPORAN KINERJA**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN**  
**KAWASAN KONSERVASI**  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

**2022**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.2/KSDAE/Set/Ren.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam LKj Direktorat RKK Tahun 2022 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat RKK dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKj Direktorat RKK Tahun 2022 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Bogor, 16 Januari 2023

Direktur Perencanaan Kawasan  
Konservasi,

**Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.**

NIP. 19730323 199903 1 002





# RINGKASAN EKSEKUTIF

## IKK

**4,14 JUTA HA (76,67%)**

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi dengan target tahun 2020-2024: 27 juta hektar dan target 2022: 5,4 Juta Ha.

## IKK

**30 UNIT KK (100%)**

Jumlah Unit Kawasan Konservasi Yang Dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status Dan Fungsi dengan target tahun 2020-2024: 150 unit KK tahun 2022 dan target 2022: 30 Unit KK.

**RATA-RATA CAPAIAN  
IKK 88,33%**

**REALISASI  
ANGGARAN 99,17%**

## FP-III

Tahun ke enam pelaksanaan (tahun 2017-2022) dari total 7 (tujuh) tahun pelaksanaan. Pada 2022 melakukan kegiatan yang mengarah pada exit strategy dalam upaya menjamin keberlangsungan kegiatan-kegiatan pasca proyek dengan merekrut konsultan exit strategy yang secara khusus untuk menyusun dokumen exit strategy. FP III telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan Integrated Area Development (IAD) di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sigi dan Poso. Saat ini proses pengembangan IAD telah sampai pada tahap konsolidasi stakeholder dan penyusunan master plan (on-going).



# DAFTAR ISI



Lokasi Foto: TN Tanjung Puting



Lokasi Foto: TN Tanjung Puting



Lokasi Foto: TN Tanjung Puting

## 1

KATA PENGANTAR .....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	5

## 2

PENDAHULUAN.....	7
Tugas dan Fungsi.....	8
Profil Sumberdaya Manusia Direktorat RKK.....	10
Isu Strategis.....	16

## 3

PERENCANAAN KINERJA.....	17
Rencana Strategis (Renstra).....	18
Perjanjian Kinerja.....	21

## 4

AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
Capaian Kinerja Organisasi.....	23
Permasalahan dan Solusi Tindak Lanjut.....	55
Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.....	56
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.....	59

## 5

PENUTUP.....	61
--------------	----

## 6

LAMPIRAN.....	67
---------------	----





SUMBER FOTO & LOKASI : LORE LINDU

# PENDAHULUAN

---

# PENDAHULUAN

Sampai dengan Desember 2020, Indonesia telah menetapkan 568 unit kawasan konservasi seluas 27,41 juta hektar (yang terdiri dari 22,10 juta hektar atau 78,74% merupakan daratan dan 5,31 juta hektar atau 21,26% merupakan perairan) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kawasan konservasi dikelola sesuai fungsinya yang terbagi atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.

Sesuai dengan PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), kegiatan penyelenggaraan KSA dan KPA diawali dengan kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan kawasan juga terbagi menjadi ke dalam: inventarisasi potensi keanekaragaman hayati, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan kawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



# Tugas dan Fungsi

## TUGAS

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi.



## FUNGSI 1

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.



## FUNGSI 2

Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.



## FUNGSI 3

Penyiapan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.



## FUNGSI 4

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.



## FUNGSI 5

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;



## FUNGSI 6

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.



## FUNGSI 7

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.





Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat RKK didukung dengan perangkat organisasi Struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat RKK.

# Profil Sumberdaya Manusia Direktorat RKK

## Status Kepegawaian



71 Orang Pegawai

47 PNS

17 PPNNP

3 Tenaga Kontrak  
Kegiatan

4 Tenaga Kontrak  
Project

## Status Kepegawaian



S2 22 Orang

S1 16 Orang

SLTA 3 Orang

D3 6 Orang

GENDER  
EQUALITY



34 Laki - Laki

34 Perempuan

1 Orang

Eselon 2

2 Orang

Eselon 3

1 Orang

Eselon 4

21 Orang

Jabatan Fungsional

22 Orang

Jabatan Pelaksana





## A. Peran Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

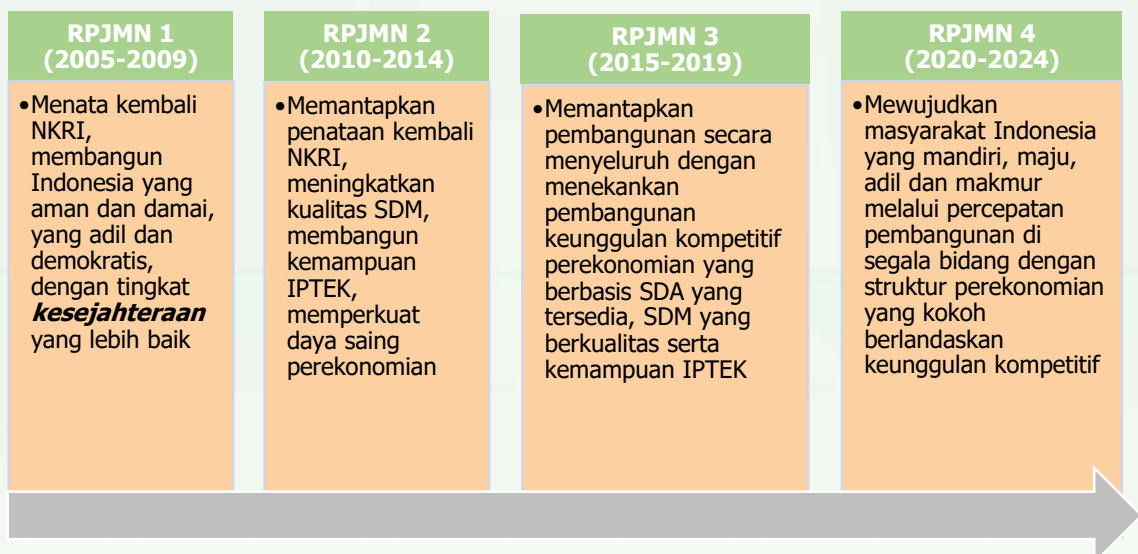
Tujuan Negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu, "membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia."

Untuk menjamin tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diartikan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);
- Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan
- Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024. Saat ini (Tahun 2022), merupakan RPJP (2005-2024) dan RPJMN 4 (2020-2024). Dimana tujuan nasional pada RPJP Periode 2005-2024, sebagaimana Gambar 1.



Gambar 2. Tujuan Nasional Pada Periode RPJP (2005-2024).

Tujuan negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang tertera dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), “Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya **kesejahteraan rakyat** melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan.”

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi secara langsung mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024 dengan melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 31). Serta melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, bahwa Perencanaan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan KSA dan KPA. Selanjutnya dalam Pasal 14, menyebutkan bahwa “Perencanaan KSA dan KPA meliputi: inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.”

Dalam rangka mencapai tujuan Negara dalam meningkatkan **kesejahteraan masyarakat**, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, berperan dalam bidang:

#### 1. Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi memiliki salah satu sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di kawasan konservasi dengan indikator luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif. Pada tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi potensi kehati tinggi pada seluruh kawasan konservasi seluas 27 juta hektar, yang meliputi 22 juta hektar kawasan konservasi daratan dan 5 juta hektar kawasan konservasi perairan.



Kawasan konservasi memiliki potensi keragaman baik hayati maupun non hayati yang tinggi, seperti keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, keanekaragaman ekosistem, geomorfologi, bentang alam, situs budaya atau situs peninggalan sejarah. Faktanya potensi-potensi kawasan konservasi tersebut belum seluruhnya tergali, teridentifikasi dan terinventarisir dengan baik, serta dikelola dalam suatu bentuk data dan informasi yang mampu menunjukkan kawasan konservasi tersebut memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

## 2. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pemolaan kawasan konservasi adalah serangkaian kegiatan untuk menyiapkan prakondisi kawasan konservasi yakni kawasan konservasi yang memiliki legalitas dan legitimasi pengukuhan Kawasan Konservasi, termasuk di dalamnya memastikan kepastian dan legalitas batas kawasan, memastikan kesesuaian antara batas lapangan dengan batas pada peta dan dokumen pengukuhan, serta menganalisa dokumen-dokumen pengukuhan kawasan konservasi.

## 3. Penataan Kawasan Konservasi

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan kedalam zona/ blok merupakan upaya membagi/ menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/ blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/ blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu "Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota," sehingga keberadaan Kawasan Konservasi bisa memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya.

#### 4. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-Latar Belakang: "Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

#### 5. Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan kerja sama ini dalam rangka memberikan kepastian dan payung hukum kegiatan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kegiatan kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi melalui fasilitasi mitra kerja sama dari unsur masyarakat, badan usaha dan Pemerintah. Kerja sama ini dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan kawasan konservasi dan/atau pertimbangan khusus untuk pembangunan strategis nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 6. *Forest Programme III* (Sulawesi)

*Forest Programme III* - Sulawesi (FP III) adalah proyek yang dilaksanakan oleh KLHK berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Indonesia. Besaran nilai kerja sama tersebut adalah EUR 13,5 juta, sedangkan



kontribusi dari Pemerintah Indonesia adalah minimal 10% dalam bentuk tunai dan barang.

Tujuan proyek ini adalah implementasi manajemen kolaborasi yang terpadu di landscape Lore Lindu, untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan strategi dan implementasi konservasi keanekaragaman hayati dan manajemen DAS dalam rangka strategi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun sasaranannya ialah: 1) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, 2) Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat, dan 3) Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Badan Pelaksana Proyek (Executing Agency) adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Adapun unit pelaksana di lapangan (*Unit Implementing Unit*) terdiri atas tiga UPT, yakni 1) BBTN Lore Lindu, 2) BPDAS Palu Poso, dan 3) BPSKL Wilayah Sulawesi. Sementara itu, output yang akan dicapai oleh FP III adalah: 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu, 2) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di DAS Palu dan Hulu Lariang, 3) Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Pedesaan sekitar TNLL, dan 4) Memperkuat kerja sama penelitian.

PEA secara aktif mendukung untuk tercapainya semua progres action plan sebagai respon atas audit khusus pada Juni 2021 lalu oleh KfW. Selain itu, terdapat *Integrated Area Development* (IAD) pada dua Kabupaten, yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso yang telah secara aktif di dukung dan difasilitasi oleh FP III, yang mana saat ini telah memasuki tahap konsolidasi stakeholder dan rencana pembentukan tim penyusun master plan IAD. Lebih jauh lagi, pada tahun 2022 FP III telah berhasil melakukan tender MonEv Eksternal, dan pelaksanaan MonEv Eksternal pun telah terlaksana dengan baik, dengan sejumlah hasil dan masukan untuk perbaikan pengelolaan proyek di tahun berikutnya.



# ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat RKK tidak terlepas dari timbulnya permasalahan utama yang dihadapi dan menjadi perhatian yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan kehati tinggi tidak terlaksana/tidak optimal (terutama pelaksanaan kegiatan lapangan di UPT), adanya refocussing anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di pusat dan UPT tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, pada FP III perbedaan kurs mata uang pada saat pencairan dana yang berakibat pada perbedaan nilai realisasi keuangan dengan rencana kegiatan yang sudah disusun untuk proyek FP III.







SUMBER FOTO: WIKIASIA - TILLORE LINDU

# PERENCANAAN KINERJA

---

# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merupakan periode ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat RKK dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024 hanya menjabarkan strategi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

**Visi** : Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, visi KLHK adalah **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**.

**Misi** : Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999



tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tujuan** : Tujuan pembangunan KLHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setaradengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

**Sasaran** : Tugas Direktorat RKK merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu:

1. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati; dan
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi.

**Program** : Direktorat RKK mendukung pencapaian Program Ditjen KSDAE yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

**Kegiatan** : Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat RKK melaksanakan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Ha: Tahun 2020-2024);
2. Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi (150 unit KK: tahun 2020-2024); dan
3. Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 Dokumen: tahun 2023-2024).

Pada tahun 2022 Direktorat RKK memiliki beberapa perubahan pada IKK dan Komponen Kegiatan yaitu:

1. IKK Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati dengan target 1 (satu) mekanisme sudah tidak lagi pada Direktorat RKK, sehingga pada tahun 2022 Direktorat RKK bertanggungjawab atas 2 (dua) IKK;
2. Komponen kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi sudah tidak lagi menjadi komponen Direktorat RKK; dan
3. Komponen kegiatan baru yang menjadi tanggung jawab Direktorat RKK yaitu Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Target jangka menengah yang harus dicapai Direktorat RKK dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat RKK tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat RKK Tahun 2020-2024.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (Volume dan Satuan) Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi (27 juta hektar: tahun 2020-2024).	7,66	11,51	15,55	21,11	27
2.	Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi (150 unit KK: tahun 2020-2024).	30	60	90	120	150
3.	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 Dokumen: tahun 2023-2024)	-	-	-	50	50



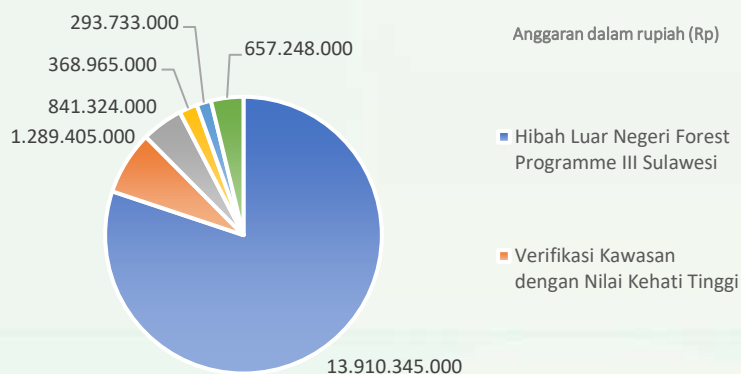
Target-target sebagaimana pada tabel di atas harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja setiap tahunnya.

## B. Perjanjian Kinerja

Direktorat RKK telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (RO)	RINCIAN OUTPUT (RO)
1	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (tahun 2020-2024: 27 Juta Hektar).	5,4 Juta Hektar	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan.	001-Rekomendasi kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan dan Kerja Sama Kawasan Konservasi.
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem.	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (tahun 2020-2024: 150 Unit KK).	30 Unit KK	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.	001-Hibah Luar Negeri Forest Programme III Sulawesi.
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan.	001-Rekomendasi kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan dan Kerja Sama Kawasan Konservasi. 002-Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektivitas.



Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja pada Direktorat RKK, Direktorat RKK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.361.020.000,-.



SUMBER FOTO & LOKASI : LABUAN BAJU, ERU D-14

# AKUNTABILITAS KINERJA

---



# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2020-2024, Renja Ditjen KSDAE tahun 2022, dan Renstra Direktorat RKK tahun 2020-2024. Direktorat RKK sebagai penanggungjawab salah satu kegiatan program KSDAE, yaitu kegiatan perencanaan kawasan konservasi yang telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai tahun 2022. IKK tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Direktur RKK sebagai komitmen pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal KSDAE atas pencapaian kinerja kegiatan tahun 2022. Adapun hasil pengukuran capaian IKK Direktorat RKK seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian IKK Direktorat RKK Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Capaian IKK	% Capaian IKK
1	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar: tahun 2020-2024).	5,4 juta hektar	4,14 juta hektar	76,67
	Penyesuaian target setelah <i>refocussing</i> anggaran	4,05 juta hektar	4,14 juta hektar	102,22
2	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK: tahun 2020-2024).	30 Unit KK	30 Unit KK	100
Rata-rata				88,33

### A.1. Capaian Kinerja Organisasi Mendukung IKK 1

Target IKK 1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi pada tahun 2022 sebesar 4,04 juta hektar sesuai Renstra tahun 2020-2024, berbeda dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 sebesar 5,4 juta hektar. Angka tersebut diperoleh dari proses penelaahan dan pemantapan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 IKK 1 tercapai sebesar 4,14 juta hektar atau 76,67% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2022. Namun demikian memperhatikan adanya *refocussing* anggaran pada pusat dan hampir seluruh UPT KSDAE, maka seyogyanya target IKK 1 mengalami penyesuaian target menjadi 4,05 juta hektar, sehingga capaian berdasar target PK tahun 2022 menjadi 102,22%. Prosentase Capaian Kinerja IKK 1 terhadap Target PK dan Target Renstra disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Prosentase Capaian Kinerja IKK 1 terhadap Target PK dan Target Renstra.

No.	Tahun	Target tahunan (Juta Hektar)	Target Renstra 2020-2024 (Juta Hektar)	Capaian (Juta Hektar)	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020- 2024)
1.	2020	7,66	27	6,93	25,67
2.	2021	3,85	27	1,72	32,03
3.	2022	5,4	27	76,67	47,40
Total			27	12,80	

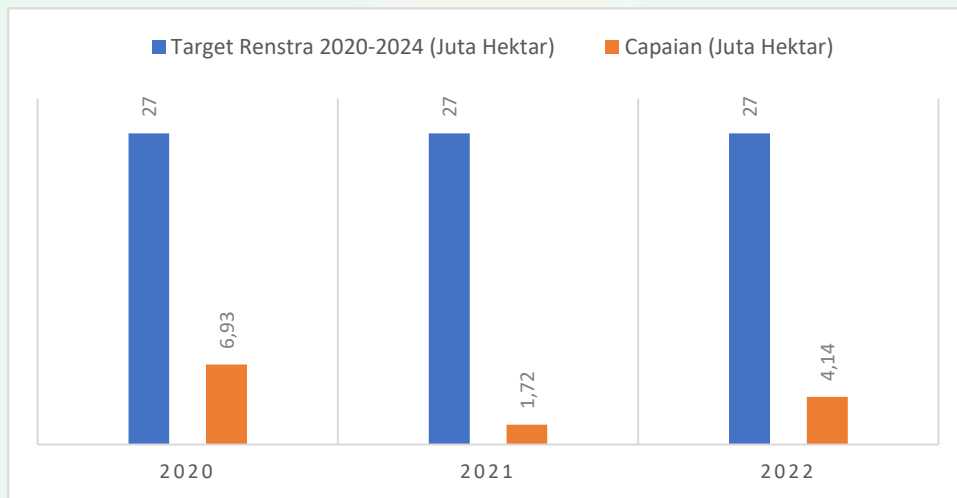
Capaian terhadap target Renstra tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Prosentase Capaian Kinerja IKK 1 terhadap Target Renstra 2020-2024.

No.	Tahun	Target tahunan (Juta Hektar)	Target Renstra 2020-2024 (Juta Hektar)	Capaian (Juta Hektar)	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020- 2024)
1.	2020	7,66	27	6,93	25,67
2.	2021	3,85	27	1,72	32,03
3.	2022	4,04	27	4,14	47,37
4.	2023	5,56	27	0	0
5.	2024	5,94	27	0	0
Total		27	27	12,80	



Adapun diagram prosentase capaian tahunan IKK 1 terhadap Renstra tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Prosentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

Tahun pertama Renstra (2020) capaian IKK 1 tinggi karena data kehati tinggi berbasis pada sebaran TSL yang sumbernya dari UPT, mitra dan metadata seperti jurnal dan portal. Sebagian besar data berupa poligon sehingga cakupan capaian bisa tinggi. Namun sebagian besar masih mengandalkan data sekunder dan bukan data primer UPT. Langkah ini diambil karena tahun 2020, belum ada alokasi anggaran inventarisasi dan verifikasi di UPT yg bersumber dari anggaran Direktorat RKK.

Tahun 2021 capaian IKK 1 menurun karena beberapa hal, antara lain:

1. Kondisi pandemi menyebabkan tidak seluruh rencana kegiatan inventarisasi di UPT dapat terlaksana.
2. Belum adanya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi di UPT.
3. Minimnya pendampingan karena kondisi global pandemi serta belum terstrukturnya langkah verifikasi dan validasi menyebabkan capaian menurun.
4. Capaian hanya berbasis data primer UPT tanpa menggunakan data sekunder dari mitra dan metadata lainnya karena sudah adanya anggaran inventarisasi dan verifikasi dari Direktorat PIKA ke UPT.

Tahun 2022 terjadi peningkatan capaian IKK 1 dibandingkan dengan tahun 2021 karena beberapa hal, antara lain:

1. Komunikasi dan pendampingan teknis terhadap UPT ditingkatkan, salah satunya dengan metode pendampingan teknis tim teknis spasial secara langsung (tatap muka). Hal ini lebih efektif dibandingkan melalui media komunikasi tidak langsung seperti tahun-tahun sebelumnya.
2. Telah tersusunnya panduan inventarisasi dan verifikasi yg membantu penyelesaian data spasial di UPT, serta proses analisis dan kompilasi di tingkat pusat yang semakin terarah dan terintegrasi.

#### **A.1.1. Analisis Kinerja Direktorat RKK yang Mendukung Realisasi Kinerja di Level Nasional**

Ditjen KSDAE mendukung pelaksanaan 3 program yaitu : Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hutan konservasi yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
- 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
- 4) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
- 6) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Sedangkan sasaran yang dimandatkan pada Ditjen KSDAE yaitu: 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL; 3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari; 4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan 6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen KSDAE tersebut diukur melalui 7 indikator kinerja program yaitu:



- 1) Luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 10.410.368 hektar;
- 2) Luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati spesies di luar kawasan konservasi seluas 10 juta hektar;
- 3) Jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 2,1 Triliun Rupiah;
- 4) Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 100 miliar rupiah;
- 5) Jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 500 desa;
- 6) Indikator kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 57,5 poin; dan
- 7) Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79 poin.

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mendukung capaian IKP Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati melalui IKK Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi dengan capaian 4,14 Juta Ha. Capaian tersebut mendukung IKP Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati sebesar 39,77%.

# OUTCOME

IKK 1



Sumber Foto: TN Way Komodo

- 1 Memvalidasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di Kawasan Konservasi dengan data ekosistem; tumbuhan dan satwa liar; fenomena alam; serta objek sejarah/religi/budaya/adat.
- 2 Sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- 3 Meningkatkan kualitas database Kawasan Konservasi.
- 4 Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik di Kawasan Konservasi.

Pada tahun 2022, IKK 1 didukung oleh komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK 1 terdiri dari:

1. Inventarisasi, Verifikasi Potensi & Permasalahan KK, dan
2. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK.

Dalam mendukung IKK 1, Direktorat RKK telah menyusun panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di kawasan konservasi pada tahun 2022 yang akan menjadi panduan bagi UPT, sebagaimana keputusan Direktur Perencanaan kawasan Konservasi Nomor: SK.15/RKK/IPKK/KSA.0/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Selain itu telah dibangun sistem pelaporan digital *e-reporting* yang terintegrasi dengan data spasial hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi.

## Untuk Apa Panduan Inventarisasi ?



Direktorat RKK telah menyusun panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di kawasan konservasi pada tahun 2022 yang akan menjadi panduan bagi UPT.

Sebagaimana keputusan Direktur Perencanaan kawasan Konservasi Nomor: SK.15/RKK/IPKK/KSA.0/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Dalam panduan telah dijelaskan bahwa sasaran kegiatan terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Verifikasi data penutupan lahan dan area terbuka/open area
2. Inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman ekosistem, termasuk mengidentifikasi ekosistem yang unik/khas
3. Inventarisasi dan verifikasi keunikan fenomena alam dan objek sejarah/religi/budaya/adat;
4. Inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman jenis (tumbuhan dan satwa)





## E-Reporting Inventarisasi & Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di dalam Kawasan Konservasi

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi  
Direktorat Jenderal KSDAE  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



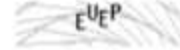
### Sign In to Admin

Enter your details to sign in to your account

Username

Password

Captcha



☐ Remember me

Continue



Dashboards E-Reporting Map

E-Reporting Home > E-reporting > Monitoring

8	Balai TN Bukit Tigapuluh	Nihil	Nihil	Nihil	Lengkap	Detail	
9	Balai TN Tesso Nilo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Detail	
10	Balai KSDA Jambi	Belum lengkap	Belum lengkap	Tersedia	Belum lengkap	Detail	
11	Balai TN Berbak Sembilang	Belum lengkap	Nihil	Nihil	Belum lengkap	Detail	
12	Balai TN Bukit Duabelas	Lengkap	Lengkap	Nihil	Nihil	Detail	
13	Balai Besar TN Kerinci Seblat	Lengkap	Lengkap	Tersedia	Lengkap	Detail	

# e-reporting

Dalam mendukung sistem pelaporan hasil inventarisasi, telah dibangun sistem pelaporan digital e-reporting yang terintegrasi dengan data spasial hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Digital e-reporting yang sudah dibangun tahun ini, memang masih memerlukan pengembangan namun sudah menyajikan sebuah sistem rekapitulasi dan resume data hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi oleh UPT, sehingga upaya pemantauan oleh pusat menjadi lebih cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan baik.



Selain dari panduan yang telah disusun dan sistem pelaporan *e-reporting*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi adalah:

### **1. Verifikasi Data Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.**

Kegiatan Verifikasi data Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dilakukan dengan verifikasi data-data ke UPT yang menjadi target untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga data shahih dan dapat dipercaya. Verifikasi dilakukan dengan memastikan metode inventarisasi yang digunakan sesuai dengan metode ilmiah. Di lapangan, UPT dapat mengacu pada metode-metode yang telah banyak dikeluarkan oleh otoritas ilmiah, seperti LIPI atau lembaga akademis.



Kegiatan ini sekaligus juga sebagai media koordinasi antara UPT/UPTD dan Pusat untuk mengkomunikasikan kendala yang dihadapi UPT/UPTD dalam implementasi panduan sehingga dapat didiskusikan untuk mendapatkan solusi. Sepanjang tahun 2022 terlaksana 7 kegiatan verifikasi ke UPT

dengan lokasi yang dikunjungi adalah sebagai berikut: BBKSDA Papua, BBKSDA Jawa Barat, BTN Tanjung Puting, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Jawa Tengah, dan BKSDA Nusa Tenggara Barat.

## 2. Penyusunan data potensi kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan laptop GIS (1 unit), SSID 4TB (2 unit), dan monitor yang diperlukan untuk mendukung penyusunan data potensi KK. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis terkait di lingkup KLHK, yaitu di lingkup KSDAE: Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, dan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE serta Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Ditjen PKTL). Koordinasi dilakukan untuk sinkronisasi data serta memastikan data *baseline* yang dipakai adalah data yang *up to date*.

## 3. Bimbingan teknis.



Inventarisasi dan Verifikasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Kawasan Konservasi seluas 27 juta hektar merupakan target yang telah dicanangkan pemerintah melalui Ditjen KSDAE pada RPJMN 2020-2024. Direktorat Perencanaan

Kawasan Konservasi telah menyusun strategi pencapaian target dengan memberikan fokus keanekaragaman hayati pada tingkat jenis dan ekosistem.

Dalam rangka mempertajam materi terkait keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, telah dilakukan FGD Inventarisasi Tipe Ekosistem dalam Pencapaian Target Inventarisasi dan Verifikasi Kehati Tinggi di Kawasan Konservasi yang melibatkan para pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS). Sebagai tindak lanjut FGD tersebut, telah dilakukan telaah awal terhadap 99 tipe vegetasi, yang kemudian dilakukan klusterisasi menjadi 19 tipe ekosistem, hasil telaah dan klusterisasi awal tersebut selanjutnya mendapat penelaahan lanjutan dan verifikasi oleh para pakar dari (Prof. Tukirin Partomihardjo dan Dr. Joeni Setijo Rahajoe) dan perwakilan Direktorat PDLKWS.



Hasil dari kegiatan ini selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi, terutama objek Tipe Ekosistem yang akan dilaksanakan di UPT.

#### 4. Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan Kawasan.

Dalam kegiatan ini Direktorat RKK memberikan pendampingan terkait penyusunan data spasial yang diperlukan untuk pencapaian IKK yang telah dijelaskan dalam panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi dengan



nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di kawasan konservasi tahun 2020-2024. Sepanjang tahun 2022 terlaksana 18 kegiatan pendampingan penyusunan data spasial ke UPT, dengan lokasi sebagai berikut: BBKSDA Riau, BTN Gunung Halimun Salak, BKSDA Kalimantan Tengah, BTN Gunung Ciremai, BTN Alas Purwo, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Maluku, BTN Manusela, BKSDA Kalimantan Timur, BBTN Bukit Barisan Selatan, Tahura R Soerjo, BTN Gunung Rinjani, BTN Bali Barat, BTN Baluran, dan BBTN Gunung Gede Pangrango.

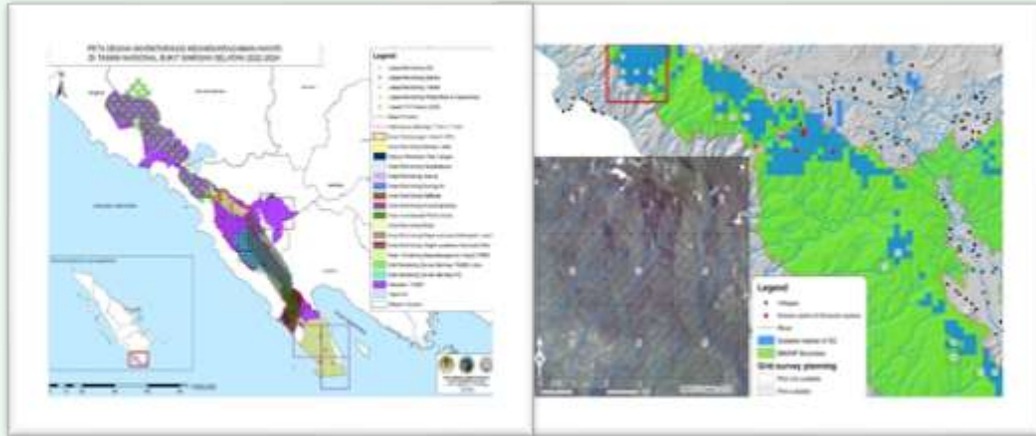
Kegiatan Inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan KK di tingkat UPT umumnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati kawasan konservasi seperti:

- a. Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar.
- b. Inventarisasi lingkungan dan sosial ekonomi budaya masyarakat.
- c. Inventarisasi permasalahan kawasan konservasi, terutama identifikasi dan verifikasi obyek tutupan lahan yang terindikasi sebagai *open area*.

Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan KK dilaksanakan untuk menyajikan data spasial hasil inventarisasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi. Hasil inventarisasi keanekaragaman hayati yang sudah dilaksanakan oleh UPT dituangkan dalam wujud spasial.

Target tahun 2022, seluas 1,25 juta hektar, dapat tercapai seluruhnya dan secara umum mengikuti pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang

dilaksanakan oleh UPT. Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan KK, secara umum sangat efektif apabila dilakukan dengan metode tatap muka dan diskusi langsung bersama Tim Teknis Spasial UPT.



Gambar 4. Beberapa contoh Peta yang dibuat oleh UPT, sebagai bagian dari penyusunan data spasial potensi dan permasalahan KK.

## 5. **Workshop/ in house training/rapat lainnya.**

Setelah panduan selesai disusun, Direktorat RKK perlu menyebarluaskan panduan tersebut kepada seluruh UPT/UPTD yang mengelola Kawasan Konservasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan semua UPT/UPTD tersosialisasi terkait panduan tersebut, memahami isinya, dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang akan dilaksanakan, serta dapat melaporkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan di aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.



Training dilakukan pada 23-25 November 2022

di Bandung dengan mengundang seluruh UPT/UPTD, Setditjen KSDAE, dan Direktorat Teknis lingkup KSDAE dengan jumlah peserta sebanyak

248 peserta baik yang hadir secara tatap muka maupun daring via Aplikasi Zoom Meeting.



## A.2. Capaian Kinerja Organisasi Mendukung IKK 2

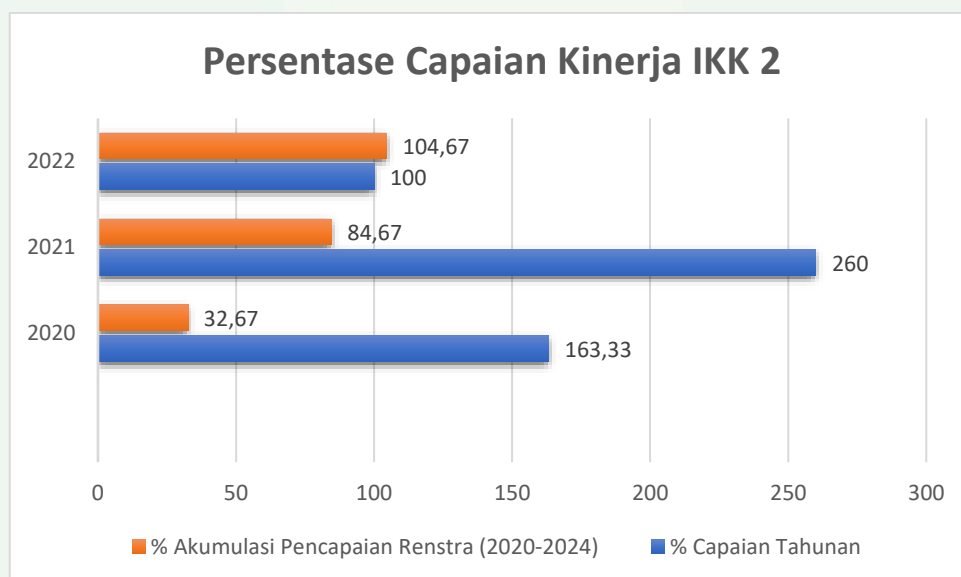
Pencapaian IKK 2 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 30 Unit KK atau 100% dari target 30 unit KK tahun 2022.

Persentase capaian kinerja tahunan dan renstra pada IKK 2 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2.

No.	Tahun	Target Tahunan (Unit KK)	Target Renstra 2020-2024 (Unit KK)	Capaian IKK 2 (Unit KK)	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	30	150	49	32,67
2.	2021	30	150	78	84,67
3.	2022	30	150	30	104,67
4.	2023	30	150	0	0
5.	2024	30	150	0	0
Total		150	150	157	

Sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 5. Diagram persentase capaian kinerja IKK 2.

Pada tahun 2022 IKK 2 mengalami perubahan verifier yaitu dari verifier yang sebelumnya adalah jika ada capaian 1 Unit KK yang sama pada beberapa komponen kegiatan di bulan yang berbeda dalam 1 tahun, maka akan dihitung menjadi capaian 1 Unit KK, dan pada tahun 2022 menjadi verifier baru, antara lain:

1. Dokumen Blok/Zona yang sudah disahkan;
2. Dokumen RPJP yang sudah disahkan; dan
3. Surat usulan penetapan fungsi kawasan.



Sehingga, capaian IKK 2 tahun 2020 yang semula sebanyak 114 Unit KK menjadi 49 Unit KK dan capaian tahun 2021 yang semula sebanyak 130 Unit KK menjadi 78 Unit KK.

Capaian IKK 2 tahun 2022 mengalami penurunan dari capaian IKK 2 tahun 2021, hal ini karena adanya penghematan anggaran kegiatan perencanaan Kawasan Konservasi di UPT sehingga beberapa lokasi Kawasan Konservasi sulit dijangkau karena anggaran tidak mencukupi.

# OUTCOME IKK 2

1

DENGAN ADANYA KEGIATAN PEMOLAAN KAWASAN KONSERVASI, TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN PENGUKUHAN SEHINGGA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

2

KEGIATAN PENATAAN ZONA/BLOK SEBAGAI TAHAP KEGIATAN PRAKONDISI YANG HARUS DIPRIORITASKAN DALAM MENDUKUNG PEMANTAPAN KAWASAN KONSERVASI, SEBELUM KAWASAN TERSEBUT DAPAT DIKEMBANGKAN, DIMANFAATKAN DAN DIKELOLA SESUAI FUNGSI DAN PERUNTUKANNYA.

PENATAAN ZONA/BLOK INI SANGAT DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAWASAN DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN GUNA MEMPEROLEH MANFAAT YANG LEBIH OPTIMAL DAN LESTARI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERMEN NOMOR 28 TAHUN 2011, PASAL 15 YAITU "PENYUSUNAN ZONASI ATAU BLOK PENGELOLAAN DILAKUKAN OLEH UNIT PENGELOLA DENGAN MEMPERHATIKAN HASIL KONSULTASI PUBLIK DENGAN MASYARAKAT DI SEKITAR KSA ATAU KPA SERTA PEMERINTAH PROVINSI DAN/ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA".

SEHINGGA KEBERADAAN KAWASAN KONSERVASI BISA MEMBERIKAN MANFAAT LEBIH TERHADAP MASYARAKAT YANG BERADA DI SEKITARNYA.

3

KEGIATAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI, YAITU:

- MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KSA, KPA, DAN TB.
- MENINGKATKAN EFESIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA.
- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS BAGI PENGELOLA KSA, KPA, DAN TB.
- MEMASTIKAN KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KSA, KPA, DAN TB.
- DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SEBAGAI ALAT UNTUK MENGELOLA DAN MEWUJUDKAN TUJUAN PENGELOLAAN KAWASAN.





# OUTCOME IKK 2

1

KEGIATAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN, YAITU:

- TERBANGUN DAN BEROPERASINYA JARINGAN LISTRIK BERUPA SATU JARINGAN SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR) SEPANJANG 4,92 KM; 19 JARINGAN SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) SEPANJANG 179,32 KM; SATU JARINGAN SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH (SKTM) SEPANJANG 34,5 KM; 24 JARINGAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) SEPANJANG 278 KM; DELAPAN JARINGAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) SEPANJANG 85 KM; SERTA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DAN JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM;
- TERBANGUN DAN BEROPERASINYA SARANA KOMUNIKASI BERUPA 47 UNIT MENARA KOMUNIKASI ATAU BASE TRANSCIEVER STATION (BTS) DAN KABEL SERAT OPTIK SEPANJANG 558,5 KM; MENDUKUNG KEBUTUHAN SARANA-PRASARANA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BERUPA AREA LATIHAN MILITER, LATIHAN TEMPUR, JALUR PATROLI, JALUR INSPEKSI PATROLI PERBATASAN, POS PENGAMANAN TERBATAS, POS POLISI, DAN LAINNYA;
- TERBANGUN DAN BEROPERASINYA SARANA TRANSPORTASI SEPANJANG 1.451,71 KM, TERMASUK DI DALAMNYA 1.176,55 KM JALAN DAN 275,16 KM JALUR PERAIRAN, SEMBILAN UNIT DERMAGA, SERTA DELAPAN UNIT SARANA KEAMANAN TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA;
- TERSEDIA DAN BEROPERASINYA SARANA MITIGASI BENCANA BERUPA DUA UNIT SISTEM DETEKSI DINI TSUNAMI, SATU TANGGUL PENGAMAN PANTAI, SATU TANGGUL AIR ASIN, DUA EMBUNG AIR, SERTA KEGIATAN NORMALISASI SUNGAI; DAN TERSEDIANYA SARANA LAINNYA SEPERTI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST), PUSKESMAS, PDAM.

5

KEGIATAN KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI KSA DAN KPA SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, YAITU:

- MENDUKUNG PELESTARIAN HABITAT DAN POPULASI TUMBUHAN DAN SATWA LIAR TERMASUK DI DALAMNYA PELEPASLIARAN LEBIH DARI 1.543 EKOR SATWA KE ALAM.
- MENDUKUNG KEGIATAN PENANGANAN DAN MITIGASI KONFLIK SATWA LIAR DENGAN MANUSIA; MENDUKUNG KEGIATAN PENYADARTAHUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN.
- MENDUKUNG KEGIATAN PENELITIAN, SURVEY, INVENTARISASI, MONITORING, PEMETAAN TERKAIT KEANEKARAGAMAN HAYATI MAUPUN SOSIAL EKONOMI, TERMASUK PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL STASIUN REINTRODUKSI ORANGUTAN CA HUTAN PINUS JANTHO, PUSAT KARANTINA DAN REHABILITASI ORANGUTAN BATU MBELIN, STASIUN PENELITIAN ORANGUTAN TAPANULI CAMP MAYANG, PUSAT KONSERVASI GAJAH SM BALAI RAJA, KLINIK KARANTINA SATWA LIAR PAPUA BARAT, DAN CAMP ELEPHANT RESCUE UNIT (ERU) TN WAY KAMBAS.
- MENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KAWASAN; MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEGIATAN WISATA ALAM; MENDUKUNG KEGIATAN PENGAMANAN KAWASAN, SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN; DAN MENDUKUNG KEGIATAN PEMULIHAN EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI SELUAS +16.267 HA.





Pada tahun 2022, IKK 2 didukung oleh komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK 2 terdiri dari:

### A.2.1 Penataan Kawasan Konservasi

Pada tahun 2022, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 53% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 16 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan tahun 2022 (Renstra tahun 2020-2024) maka persentase target jangka panjang yang telah dicapai adalah sebesar 63,33% atau 95 dokumen zonasi dan/atau penataan blok dari rencana 150 dokumen.



Tabel 7. Rekapitulasi Pengesahaan Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan sampai dengan 31 Desember 2022.

Fungsi Kawasan	Jumlah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
Cagar Alam (CA)	214	188	26
Suaka Margasatwa (SM)	80	69	11
Taman Wisata Alam (TWA)	130	122	8
Taman Buru (TB)	11	11	0
Taman Hutan Raya (THR)	39	31	8
Taman Nasional (TN)	54	54	0
KSA/KPA	40	0	40
<b>Total</b>	<b>568</b>	<b>475</b>	<b>93</b>

Pada Renstra tahun 2020-2024, kegiatan penataan kawasan konservasi juga memiliki target penandaan batas zona blok. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/KLHK-Setjen/2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengesahan dokumen Zona Blok Pengelolaan di tindak lanjuti dengan pemasangan batas tanda zona blok pengelolaan untuk tahun 2022 ini target penandaan batas zona blok bergabung dengan penataan kawasan

konservasi sebanyak 30 dokumen. Adapun hasil realisasi yang dicapai penandaan zona blok sebanyak 11 dokumen yang terdiri dari: SM Lamandau, TN Sebangau, TN Bantimurung Bulusaraung, TB Lingga Isag, TWA Kepulauan Banyak, TWA Gunung Api Banda, TN Manupeu Tanadaru, TWA Bukit Kaba, TWA Danau Dendam Tak Sudah, CA Danau Dusun Besar, TN Bukit Tiga Puluh.

Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Penataan dan Penandaan) tahun 2020-2022 secara lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan KK.

No	Tahun	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan
1	2020	30	57	190	45 unit penataan 12 unit penandaan batas zona blok
2	2021	30	51	170	34 unit penataan 17 unit penandaan batas zona blok
3	2022	30	27	53	16 Penataan 11 Unit Penandaan Batas Zona Blok
4	2023	30	-	-	-
5	2024	30	-	-	-
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>95 unit penataan 40 unit penandaan batas zona blok</b>

### A.2.2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK

Kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja komponen penyelesaian permasalahan Pemolaan KK pada Direktorat Perencanaan KK yaitu:

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi.
2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemolaan kawasan Konservasi.

Sedangkan untuk tingkat UPT penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi dengan kegiatan analisis permasalahan pengukuhan kawasan konservasi.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bidang pemolaan kawasan konservasi dilakukan dengan beberapa hal berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu:
  1. Mengumpulkan dan mempelajari sejarah kawasan termasuk kronologis pengukuhan kawasan.

2. Mempelajari peraturan perundang-undangan terkait pengukuhan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi.
- b. Rapat persiapan, yaitu:
  1. Rapat persiapan dilaksanakan di kantor Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.
  2. Mempelajari dasar acuan/ dasar pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya dokumen anggaran serta identifikasi permasalahan pengukuhan yang akan diselesaikan.
  3. Menentukan lokasi yang akan dibahas, tempat dan waktu pelaksanaan.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 2 kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bidang pemolaan kawasan konservasi yaitu di Balai KSDA Nusa Tenggara Barat dan Balai TN Kepulauan Seribu. Tujuan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bidang pemolaan kawasan konservasi adalah:

1. Memberikan bimbingan teknis mengenai pemantapan kawasan konservasi.
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan pemantapan kawasan konservasi.
3. Menyampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Nomor Register KSA, KPA dan TB yaitu SK.99/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2022.

Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK dilakukan dengan mengundang unsur Ditjen terkait, UPT terkait dan para pihak yang terlibat.



Pembinaan dan koordinasi dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi secara intensif dan terus menerus dengan Direktorat Jenderal PKTL, melalui koordinasi dan rapat-rapat, Direktorat Perencanaan Kawasan

Konservasi bersama unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal PKTL, serta melakukan koordinasi dalam memetakan permasalahan pengukuhan kawasan konservasi, untuk kemudian secara bersama merumuskan langkah-langkah penyelesaian.

Untuk tingkat UPT penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi dengan kegiatan analisis permasalahan pengukuhan kawasan konservasi yang telah berhasil dicapai adalah 3 (Tiga) target kawasan konservasi yaitu:



1. TWA Lau Debuk-debuk di Balai Besar KSDA Sumatera Utara.
2. CA Dolok Saut di Balai Besar KSDA Sumatera Utara, kegiatan rapat penyelesaian permasalahan pemolaan selain untuk kawasan CA Dolok Saut juga dilakukan pembahasan untuk kawasan TWA Dolok Tinggi Raja, CA Martelu Purba dan TWA Sijaba Hutaginjang.
3. TB Semidang Bukit Kabu di Balai KSDA Bengkulu dan Lampung.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan konservasi tersebut, dibutuhkan juga peningkatan pemahaman di lingkup Ditjen KSDAE terhadap proses pengukuhan kawasan konservasi serta cara mengidentifikasi sumber permasalahannya, sehingga dapat ditentukan langkah tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi. Penggunaan media visual, seperti video, merupakan salah satu pilihan yang efektif dalam menyampaikan informasi untuk meningkatkan pemahaman para pihak, terutama di lingkup Ditjen KSDAE.

### **A.2.3. Rencana Pengelolaan KK Jangka Panjang**

Terdapat dari 6 pokok kegiatan pada Rencana Pengelolaan KK Jangka Panjang, antara lain:

#### **1. Workshop**

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi memandang perlu dilaksanakan *Workshop* Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi agar pemangku kawasan (Unit Pelaksana Teknis) dapat menyusun rencana pengelolaan sesuai dengan dinamika kebijakan dan kondisi kawasan sesuai dengan tujuan penunjukan/penetapan suatu kawasan konservasi. Selain kuantitas dalam perencanaan yang harus menjadi target, kualitas dokumen Rencana Pengelolaan KK juga perlu dijaga sesuai ketentuan dan kaidah filosofis teknis dan *science*.





Kegiatan *Workshop* Perencanaan Kelola Kawasan konservasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Haris Malang, Jawa Timur, mulai tanggal 25–28 Oktober 2022 dan di ikuti oleh 7 UPT KLHK dan 13 UPT Pengelola Tahura dengan peserta sebanyak 20 orang.

## 2. Bimbingan Teknis dan Supervisi

Kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dilakukan di beberapa lokasi seperti: BKSDA Maluku, BBKSDA Papua, BKSDA Kalimantan Tengah di Palangkaraya, BKSDA Sumatera Barat di Padang, BKSDA Sulawesi Tenggara di Kendari, BKSDA Nusa Tenggara Barat di Mataram, ke BTN Tanjung Putting di Pangkalan Bun, Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunogoro I di Karanganyar, Jawa Tengah, dan BTN Tesso Nilo.



## 3. Pembinaan dan Koordinasi

Kegiatan pembinaan dan koordinasi dilakukan di beberapa lokasi seperti: BTN Gunung Ciremai, Makassar dan Enrekang, provinsi sulawesi selatan, Balai TN Nusa Bunaken di Manado, BBKSDA Jawa Barat di Bandung, Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat



## 4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pengeolaan kawasan konservasi terkait perencanaan kawasan di Resort Rajegwesi Jamber, BTN Meru Betiri dilakukan di Resort Rajegwesi Jamber, BTN Meru Betiri yang dilaksanakan tanggal 23-26 Februari 2022.

## 5. FGD UU 5/90

FGD UU 5/90 dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 26–27 Agustus 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta dan di hadiri oleh kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kemeterian Dalam Negeri, dan Kementerian LHK.



## 6. Penyusunan Rencana Makro

Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RM KSDAHE) adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk kebijakan, program, kegiatan, dan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem merupakan penjabaran dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Revisi I) dan menjadi acuan dan arahan semua pihak dalam melaksanakan pembangunan khususnya bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam.



Penyusunan draft RM KSDAHE lingkup Direktorat Jenderal KSDAE didasari oleh Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.7/KSDAE/KK/KSA.1/1/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Perubahan mendasar yang telah dilakukan selama penyusunan draft RM KSDAHE adalah mengenai substansi kegiatan konservasi sumber daya alam hayati di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Melalui Nota Dinas Plt. Direktur Perencanaan



Kawasan Konservasi nomor ND.114/RKK/IPKK/KSA.0/3/ 2022 tanggal 25 Maret 2022, *draft* Dokumen Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem diserahkan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem surat Direktur Jenderal. Selanjutnya, *draft final* RM KSDAHE diserahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.309/KSDAE/RKK/KSA.0/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Penyerahan *Draft* Dokumen Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

#### A.2.4. Kerja Sama Penyelenggaraan KK

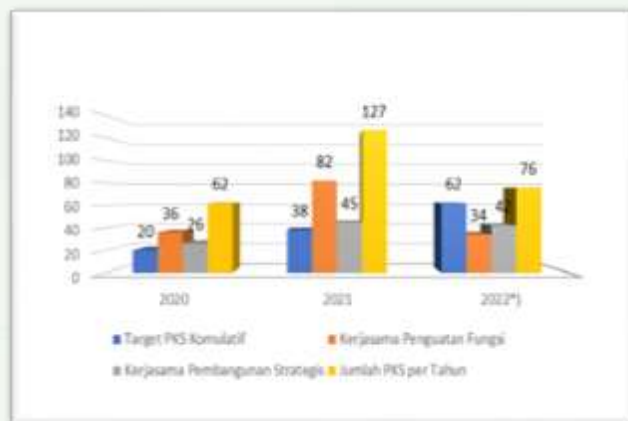
Penyelenggaraan kerja sama telah memberikan hasil positif di dalam mendukung efektifitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi serta mendukung pembangunan untuk ketahanan nasional.



Dalam  
tahun  
2022

dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah ditanda tangani sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dokumen Perjanjian Kerja Sama yang

terdiri dari kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 34 Dokumen PKS dan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebanyak 42 Dokumen PKS. Kegiatan komponen Kerja Sama Penyelenggaraan KSA atau KPA yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKK 2 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. NSPK (Penyusunan NSPK Kerja Sama/Juknis/Jukla kerja sama penyelegaran KK.  
Penyusunan/ reviu NSPK dilaksanakan berdasarkan peraturan dan norma serta rencana kegiatan terkait kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA, dan digunakan

sebagai petunjuk tentang pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA yang dapat menjadi pedoman/ acuan bagi pelaksana dan mitra/pemohon.

a. Metode Pelaksanaan

1) Persiapan, meliputi:

- a) Menyiapkan sarana prasarana kegiatan,
- b) membentuk tim pelaksana kegiatan,
- c) membahas dan mempelajari dasar acuan/ dasar pelaksanaan kegiatan,
- d) menyusun rencana kegiatan termasuk didalamnya rencana anggaran kegiatan.

2) Pelaksanaan Penyusunan/ Reviu NSPK, meliputi:

- a) Pelaksanaan kegiatan penyusunan/reviu NSPK, dilakukan oleh pusat dengan mengundang narasumber yang membidangi dan perwakilan UPT.
- b) Kegiatan penyusunan/ reviu naskah NSPK, dilakukan dengan cara penyusunan materi NSPK dan diskusi lingkup internal tim penyusun.
- c) Kegiatan pembahasan materi naskah NSPK, dilakukan dengan cara penyampaian materi dan diskusi dengan praktisi terkait sehingga dihasilkan rekomendasi naskah NSPK yang telah disempurnakan.
- d) Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan
- e) Laporan harus memuat seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, yang akan menjadi bahan monitoring pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA.

2. Koordinasi dan Konsultasi terkait kerjasama penyelenggara KK.

Koordinasi dan konsultasi dilakukan dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi data dan informasi terkait rencana kerja sama maupun pelaksanaan kerja sama.

Kordinasi dilakukan untuk mendorong proses finalisasi dokumen perjanjian kerja sama dan dokumen turunannya, mulai dari perencanaan, pengecekan lapangan, pembahasan-pembahasan hal substansi maupun teknis, hingga penyusunan/ pembahasan/penandatanganan dokumen (PKS, RPP, RKL dan RKT).

Konsultasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau masukan yang berguna dan dibutuhkan untuk implementasi perjanjian kerja sama yang lebih baik.

a. Metode Pelaksanaan

1) Persiapan, meliputi:

- a) Menyiapkan sarana prasarana kegiatan,

- b) membentuk tim pelaksana kegiatan,
  - c) membahas dan mempelajari dasar acuan/ dasar pelaksanaan kegiatan,
  - d) menyusun rencana kegiatan termasuk didalamnya rencana anggaran kegiatan.
  - e) Menyiapkan materi, data dan informasi sebagai bahan koordinasi dan konsultasi.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi terkait kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA/KPA, meliputi:
- a) Dilakukan dengan cara mengunjungi instansi terkait yang membidangi kerja sama Penyelenggaraan KSA,KPA dan atau Direktorat Teknis terkait, Balai/ Balai Besar KSDA atau Balai/ Balai Besar Taman Nasional atau UPTD Taman Hutan Raya/ Dinas Kehutanan terkait.
  - b) Metode yang digunakan adalah dengan melakukan rapat atau diskusi dengan Pimpinan Pusat, Pimpinan instansi terkait, Kepala Balai dan staf teknis terkait dan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aktual.
  - c) Membuat laporan hasil perjalanan dinas yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Kerjasama penyelenggara KK.

Fasilitasi Kerja Sama dilakukan terhadap usulan/permohonan kerja sama, berupa pengkajian lapangan, Penyelesaian Permasalahan Kerja Sama, dan penyusunan/pembahasan/penandatanganan dokumen (PKS, RPP, RKL dan RKT).

a. Metode Pelaksanaan

1) Persiapan meliputi:

- a) Menyiapkan sarana prasarana kegiatan,
- b) membentuk tim pelaksana kegiatan,
- c) membahas dan mempelajari dasar acuan/ dasar pelaksanaan kegiatan,
- d) menyusun rencana kegiatan termasuk didalamnya rencana anggaran kegiatan.
- e) Mengumpulkan data awal dalam rangka fasilitasi kerja sama.

2) Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama, meliputi:

- a) Pengumpulan bahan dan data yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi kerja sama.



- b) Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c) Laporan harus memuat seluruh rangkaian pelaksanaan dan hasil kegiatan.
- d) Rekomendasi tim teknis sebagai intisari laporan juga perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dirjen KSDAE dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Bimbingan Teknis/ *Coaching Clinic* dilakukan sebagai upaya memberikan informasi dan menjelaskan kepada UPT KSDAE terkait teknik tata cara kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA.

a. Metode Pelaksanaan

1) Persiapan meliputi:

- a) Menyiapkan sarana prasarana kegiatan,
- b) membentuk tim pelaksana kegiatan,
- c) membahas dan mempelajari dasar acuan/ dasar pelaksanaan kegiatan,
- d) menyusun rencana kegiatan termasuk didalamnya rencana anggaran kegiatan.
- e) Menyusun bahan dan materi bimbingan teknis dan sosialisasi.

2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ *Coaching Clinic* Kerja Sama, meliputi:

- a) Menyelenggarakan bimbingan teknis/ *coaching clinic* tata cara kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA dengan mengundang seluruh UPT terkait.
- b) Memberikan bimbingan teknis/ *coaching clinic* pada UPT yang memerlukan dukungan teknis lebih lanjut.
- c) Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- d) Laporan harus memuat seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, yang akan menjadi bahan monitoring pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA.

4. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama penyelenggaraan KK.

Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan kerja sama, terutama untuk mengantisipasi potensi-potensi permasalahan yang mungkin terjadi. Monitoring dilakukan secara periodik setiap tahun pada jangka waktu perjanjian kerja sama atau sewaktu-waktu ketika diperlukan.

- a. Evaluasi dilakukan pada kerja sama yang akan berakhir dengan tujuan melihat dan menilai jalannya hasil dan capaian dari perjanjian kerja sama. Hasil evaluasi diperlukan sebagai pertimbangan untuk pemberian persetujuan perpanjangan kerja sama. Metode Pelaksanaan:
- 1) Persiapan, meliputi:
    - a) Menyiapkan sarana prasarana kegiatan,
    - b) Membentuk tim pelaksana kegiatan,
    - c) Membahas dan mempelajari dasar acuan/dasar pelaksanaan kegiatan,
    - d) Menyusun rencana kegiatan termasuk di dalamnya rencana anggaran kegiatan.
    - e) Menyiapkan materi, data dan informasi sebagai bahan koordinasi dan konsultasi.
  - 2) Pelaksanaan, meliputi:
    - a) Dilakukan dengan cara mengunjungi instansi terkait yang membidangi kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan atau Direktorat Teknis terkait, Balai/Balai Besar KSDA atau Balai/Balai Besar Taman Nasional atau UPTD Taman Hutan Raya/Dinas Kehutanan terkait.
    - b) Metode yang digunakan adalah dengan melakukan rapat atau diskusi dengan Pimpinan Pusat, Pimpinan instansi terkait, Kepala Balai dan staf teknis terkait, maupun dan melakukan kunjungan lapangan.
    - c) Membuat laporan hasil perjalanan dinas yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2022, Subdit Pengutan Fungsi dan Pembangunan Strategis membangun Sistem Informasi Kerja Sama di Kawasan Konservasi (ZIGMA/sigma-kk.info) dengan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,- Aplikasi tersebut sebagai Database Permohonan Kerja Sama dan *One stop information* terkait Permohonan dan Kegiatan Kerja Sama. Aplikasi tersebut sangat dibutuhkan karena dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA.



## Z I G M A

Tahun 2022 Direktorat RKK membangun Sistem Informasi Kerja Sama di Kawasan Konservasi yaitu ZIGMA/sigma-kk.info sebagai Database Permohonan Kerja Sama dan One stop information terkait Permohonan dan Kegiatan Kerja Sama yang dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA.

Ruang lingkup pekerjaan dimulai dari Rancang Bangun Sistem dengan Model aplikasi Berbasis web dimana secara teknis lingkup kegiatan ini merupakan aktifitas yang berorientasi pada pembuatan sistem perangkat lunak dan mekanisme pelaporan dan monitoring yang memudahkan dalam melakukan organisasi dan manajemen data yang berkaitan dengan permohonan kerja sama penyelenggaraan Kawasan Konservasi, kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Perancangan database Aplikasi Monev Kerja Sama, mendesain suatu prosedur database agar memiliki konsep dan alur yang jelas, antara lain:
  - Pendesainan Key Code(ID), diantaranya menganalisis hak pengguna yang dapat sebagai pengguna (user), dan Administrator sebagai pengelola aplikasi yang memiliki hak akses penuh.

- Pemilihan item-item (field) apa yang harus ditampilkan.
- Pendesainan data-data lain yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi aplikasi yang diinginkan.
- Pembuatan sistem database permohonan dan realisasi kegiatan kerja sama.

2. Pembuatan Desain Interface Aplikasi Monev Kerja Sama, setelah struktur database Aplikasi Monev Kerja Sama selesai, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan desain interface aplikasi, desain ini meliputi:

- Desain dashboard aplikasi
- Desain profil setiap permohonan dan kegiatan
- Desain form
- Desain Log In/Log Out User

3. Uji coba aplikasi monev kerja sama untuk memastikan aplikasi yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan.

4. Input data kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, sistem yang telah selesai



## A.3. Forest Programme III-Sulawesi

Output 1, tercapai 40 KKM (100%), terpasang batas hidup pada 40 desa (100%), terselenggara Patroli & Monitoring mencakup 53.933,43 ha (25,11% dari target 30%) dari luasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), dan telah berlangsung penilaian populasi kunci.

Output 2, telah tercapai Rehabilitasi Hutan Lindung 705 ha (100%), tertanam agroforestri 1835 ha (100%), terpasang 60 unit check dam, 20 gully plug, dan 4 SPAS.

Output 3, telah terbentuk 48 peta PLUP (Participatory Land Use Planning) dari target 47 desa (100%), pendampingan oleh 24 fasilitator desa pada 57 desa, dan dihasilkan 80 local champion, serta telah tersalurkan Dana Konservasi Desa (DKD) pada 40 desa (Rp 120.000.000/ Desa). Selain itu, telah terbentuk 14 izin Perhutanan Sosial (PS) seluas 9.296 ha, dan telah tersalurkan bantuan pada 22 Kelompok perempuan (KP), serta telah terfasilitasi rencana Integrated Area Development (IAD) pada Kabupaten Poso dan Sigi.

Output 4, telah berjalan riset utama yang melibatkan staf PIU BBTN Lore Lindu, dengan 3 (tiga) topik utama yakni: 1) Biometrika Kemiri dan Rotan di sekitar TNLL, 2) Pemodelan Habitat Monyet di TNLL, dan 3) Pemodelan Karbon dari Sistem Agroforestri di sekitar TNLL.

Output 5, telah selesai dilaksanakan semua kegiatan operasional dan manajemen proyek sesuai target 2022, baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM, pembayaran konsultan, serta pengelolaan keuangan.

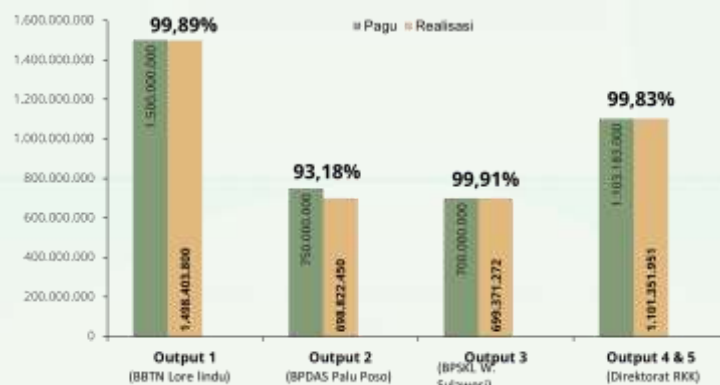


### A.3.1. Anggaran Forest Programme III



Gambar 4. Realisasi Sumber Dana HLN *Forest Programme* III-Sulawesi untuk Output Tahun 2022.

*Forest Programme* III-Sulawesi selama tahun 2022 telah mencapai angka realisasi HLN dan RMP yang dapat dilihat pada kurva di atas dan di bawah. Realisasi penggunaan anggaran HLN Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada gambar di atas pada Output 1 yaitu BBTN Lore Lindu mencapai angka realisasi 96,84% dari pagu sebesar Rp.6.840.978.200,- dari pagu sebesar Rp.7.064.318.000,-. Pada Output 2 BPDAS Palu Poso dapat dilihat output realisasi di angka 80,83% atau sebesar Rp3.203.343.492,- dari pagu Rp.3.963.140.000,-. Selanjutnya pada Output 3 BPSKL Wilayah Sulawesi, realisasi mencapai persentase 95,62% atau sebesar Rp.6.035.318.173,- dari pagu Rp.6.311.952.000,-. Adapun realisasi terbesar pada Output 4 dan 5 yaitu Direktorat RKK dengan realisasi 98,89% atau sebesar Rp.12.664.419.018,- dari pagu Rp.12.807.162.000,-.



Gambar 5. Realisasi Sumber Dana RMP *Forest Programme* III - Sulawesi untuk Output Tahun 2022.



Selanjutnya pada sumber dana RMP Realisasi penggunaan anggaran RMP tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada gambar di atas. Dapat dilihat pada Output 1 BBTN Lore Lindu mencapai angka realisasi 99,89% dari pagu atau sebesar Rp.1.498.403.800,- dari pagu sebesar Rp.1.500.000.000,-. Pada Output 2 BPDAS Palu Poso dapat dilihat output realisasi di angka 93,18% atau sebesar Rp.698.822.450,- dari pagu Rp.750.000.000,-. Selanjutnya pada Output 3 BPSKL Wilayah Sulawesi, realisasi mencapai persentase 99,91% atau sebesar Rp.699.371.272,- dari pagu Rp.700.000.000,-. Adapun realisasi terbesar pada Output 4 dan 5 yaitu Direktorat RKK dengan realisasi 99,83% atau sebesar Rp.1.101.351.951,- dari pagu Rp.1.103.183.000,-.



Gambar 6. Tren Realisasi HLN Setiap Tahun (PEA & PIU)

Pada gambar di atas, tren realisasi HLN dari penggabungan Output 1 hingga Output 5 mengalami penurunan, dimana ada tahun 2021 angka realisasi sudah pada angka 97,55% dan pada tahun 2022 turun menjadi 95,35%.



Gambar 7. Tren Realisasi RMP Setiap Tahun (PEA & PIU).



Berdasarkan rekap data realisasi sumber dana RMP, tren realisasi RMP *Forest Programme III*-Sulawesi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 persentase realisasi di angka 98,60% dan pada tahun 2022 naik menjadi 98,62%.

*Forest Programme III*-Sulawesi pada bulan Oktober tahun 2022 melakukan Top Up Anggaran HLN untuk pembayaran konsultan pelaksana dan konsultan riset termin kedua oleh Output 4 Direktorat RKK. *Top Up* anggaran sebesar Rp.725.860.000,- untuk pembayaran konsultan riset dan sebesar Rp.1.048.760.000,- untuk pembayaran konsultan pelaksana dengan total anggaran sebesar Rp 1.774.620.000,-. Adapun dari total anggaran yang diajukan tersebut, kemudian direalokasi dari Output 1 BBTN Lore Lindu sebesar Rp.1.064.110.000,-. Karena adanya realokasi anggaran dari BBTNLL tersebut, jumlah anggaran yang diajukan top up oleh Output 4 adalah sebesar Rp.710.510.000,-.

### **A.3.2. Analisis Keberhasilan Kegiatan *Forest Programme III*–Sulawesi**

Keberhasilan FP III dalam mencapai sebagian besar outputnya tidak lepas dari kerja keras, kerja sama, koordinasi, serta tekad untuk selalu memberikan yang terbaik pada setiap hasil pekerjaan. Hal tersebut tercermin dari capaian kegiatan FP III yang mana sebagian besar output telah tercapai, khususnya secara kuantitas pada masing-masing target output. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian untuk kegiatan pada 2023 dan atau 2024 mendatang adalah peningkatan kualitas output yang telah dicapai. Artinya *outcome* dari setiap masing-masing output yang akan menjadi perhatian untuk dicapai oleh FP III. Walaupun pada *log frame* dalam dokumen SA (*Separate Agreement*) tidak ada kewajiban FP III untuk meningkatkan kualitas output atau menghasilkan output di atas target yang ditetapkan. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen yang tinggi akan pelaksanaan project ini, FP III telah memilih jalan untuk mengoptimalkan semua hal tersebut, dengan upaya - upaya strategis untuk peningkatan output.



## Permasalahan

1

### IKK 1

Pelaksanaan kegiatan di UPT masih belum terstruktur, UPT belum seluruhnya melaporkan hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan, Refocusing anggaran kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi baik di pusat maupun di UPT.

2

### IKK 2

Refocussing anggaran, data Inventarisasi potensi KK yang belum lengkap untuk bahan penyusunan dokumen zona/blok, perbedaan peta yang jadi acuan dengan kondisi de facto di lapangan, terdapat UPT kurang memahami metode dan prosedur, kriteria dan peruntukan dalam penyusunan zona/blok sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 tahun 2015 dan aturan perdirjen.

3

### FOREST PROGRAMME III SULAWESI

PIU BPDAS Palu Poso mengalami stagnasi realiasi hingga pertengahan tahun realisasi HLN masih 0% karena hasil special audit KfW 2021 sehingga menimbulkan aspek kehati-hatian yang tinggi dalam merealisasikan anggaran kegiatan, Optimalisasi penggunaan inovasi SIMRELI pada PIU BBTN Lore Lindu masih sangat rendah, pemeliharaan bangunan fisik, khususnya bangunan KTA di BPDAS Palu Poso sangat minim, penyusunan dokumen exit strategy yang ditargetkan final pada akhir Desember 2022 belum tercapai, kurs mata uang untuk dana HLN.

## Solusi Tindak Lanjut



1

### IKK 1

Pengesahan panduan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi dan pembangunan sistem pelaporan digital e-reporting yang terintegrasi dengan data spasial hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi.

2

### IKK 2

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal PKTL dalam mencari solusi permasalahan pemantapan kawasan baik status maupun luasan.

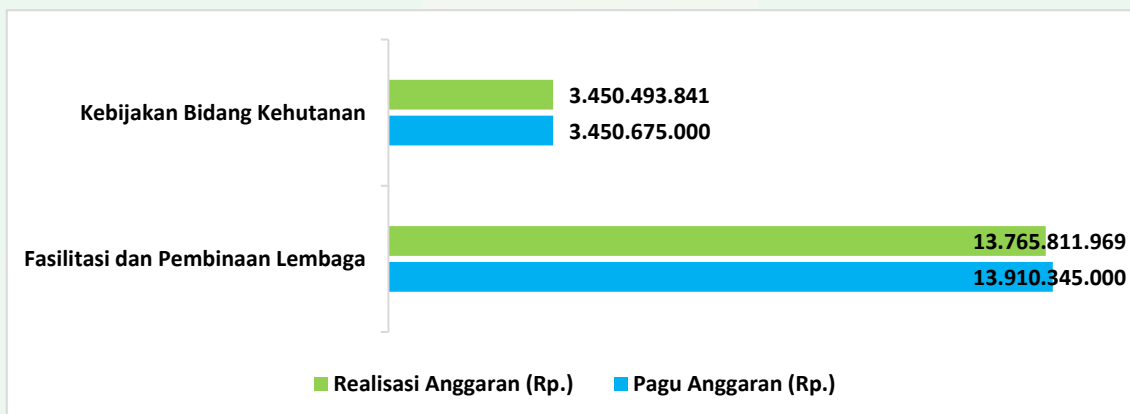
3

### FOREST PROGRAMME III SULAWESI

PEA melakukan peran pendampingan dan fasilitasi pada PIU BPDAS Palu Poso secara intens, Pengembangan aplikasi SIMRELI dan peningkatan kapasitas SDM dalam analisis data-data hasil SIMRELI, telah didorong dan dilakukan upaya pemeliharaan bangunan selama periode 2022, Pendampingan secara intens dan koordinasi dengan konsultan exit strategy yang menyusun dokumen tersebut, mengoptimalkan sebaik-baiknya semua kegiatan agar tercapai realisasi paling optimal di setiap kegiatan yang dilakukan,

## B. Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Berdasarkan aplikasi OM SPAN tanggal 2 Januari 2023, realisasi anggaran Direktorat RKK tahun 2022 sebesar Rp.17.216.305.810,- atau 99,17% dari total anggaran sebesar Rp.17.361.020.000,-. Dimana realisasi output Fasilitas dan Pembinaan Lembaga sebesar Rp.13.765.811.969,- atau 98,96% dari pagu sebesar Rp.13.910.345.000,- dan output Kebijakan Bidang Kehutanan sebesar Rp.3.450.493.841,- atau 99,99% dari pagu sebesar Rp.3.450.675.000,- sebagaimana disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Realisasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2022  
Berdasarkan OM SPAN Tanggal 2 Januari 2023

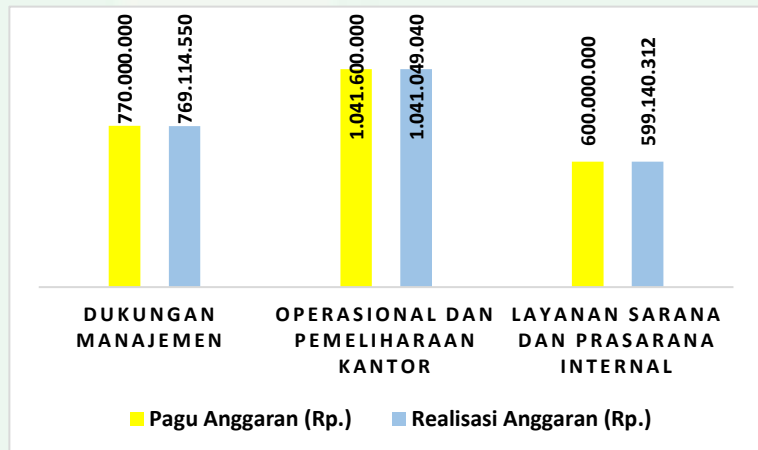
Realisasi anggaran teknis Direktorat RKK tahun 2022 berdasarkan aplikasi SAKTI tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana disajikan Gambar 7.



Gambar 7. Realisasi Anggaran Teknis Direktorat RKK Tahun 2022  
Berdasarkan SAKTI Tanggal 2 Januari 2023

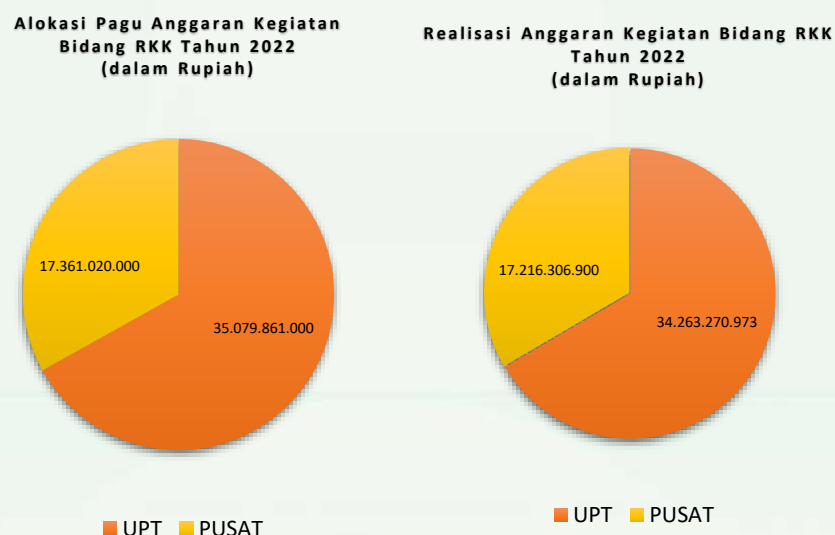


Adapun realisasi Dukungan Manajemen Direktorat RKK tahun 2022 berdasarkan aplikasi SAKTI tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp. 2.409.303.902,- atau 99,90% dari pagu sebesar Rp. 2.411.600.000,-.




Dimana realisasi kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp. 769.114.550,- atau 99,88% dari pagu sebesar Rp.770.000.000,- , kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 1.041.049.040,- atau 99,94% dari pagu sebesar Rp.1.041.600.000,- dan kegiatan Layanan sarana dan prasarana internal sebesar Rp.599.140.312,- atau 99,85% dari pagu sebesar Rp.600.000.000,-.

Dalam pencapaian IKK bidang RKK didukung oleh anggaran Pusat dan UPT. Berdasarkan aplikasi e-Monev Bappenas tanggal 2 Januari 2023, realisasi anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp.51.479.577.873,- atau 98,16% dari pagu sebesar Rp. 52.440.881.000,- . Adapun proposi alokasi pagu dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan pada Gambar 8.




Gambar 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Bidang RKK Tahun 2022

# ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI



Capaian rata-rata IKK Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah 88,33% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,17%. Terkait besarnya anggaran, selama tahun 2022 terjadi *refocusing* anggaran pada kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi (di Direktorat RKK dan di UPT) yang mendukung pencapaian IKK 1 dan IKK 2.




Berdasarkan penghitungan setelah *refocusing* anggaran, kegiatan Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi tersisa sebesar 75,07% dari anggaran awal. Jika target IKK 1 sebesar 5,4 juta hektar direkalkulasi terhadap besarnya *refocusing* anggaran maka menjadi sebesar 4,05 juta hektar dengan prosentase capaian IKK sebesar 102,22% dan jika target IKK 2 sebanyak 30 Unit KK direkalkulasi terhadap besarnya *refocusing* anggaran maka target menjadi sebanyak 23 Unit KK dengan prosentase capaian IKK sebesar 130,43%, sehingga rata-rata capaian IKK sebesar 116,33% dengan realisasi kegiatan Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi sebesar 98,25%.

Dari rekalkulasi besaran target tersebut di atas, dapat dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan prosentase realisasi anggaran dengan prosentase capaian IKK setelah dilakukan *refocusing*, maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,84 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja.

Pada IKK 1, berdasarkan penghitungan setelah *refocusing* anggaran, prosentase capaian IKK 1 sebesar 102,22% dan prosentase realisasi anggaran IKK 1 sebesar 97,94%. Jika dilakukan analisis efisiensi pencapaian IKK 1, maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,95 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada IKK 1 Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja.

Pada IKK 2, berdasarkan penghitungan setelah *refocusing* anggaran, prosentase capaian IKK 2 sebesar 130,43% dan prosesntase realisasi anggaran IKK 2 sebesar 98,27%. Jika dilakukan analisis efisiensi pencapaian IKK 2 maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,75 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada IKK 1 Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja.







SUMBER FOTO & LOKASI : TN GUNUNG HALIMUN SALAK, JAYGEUX PHOTOGRAPH

# PENUTUP

---



# PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat RKK tahun 2022 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan Direktorat RKK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesimpulan atas capaian kinerja Direktorat RKK serta langkah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain:

1. Rata-rata capaian akumulasi IKK Renstra (2020-2024) tahun 2022 adalah sebesar 88,33% dengan realisasi anggaran Direktorat RKK tahun 2022 sebesar 99,17%.
2. Capaian Kinerja IKK 1 tahun 2022 adalah 4,14 Juta Hektar dari target 5,4 Juta Hektar (76,67%), capaian kinerja IKK 1 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah 12,8 Juta Hektar dari target 27 Juta Hektar (47,41%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 99,99%.
3. Capaian Kinerja IKK 2 tahun 2022 adalah 30 unit KK dari target 30 unit KK (100%), capaian kinerja IKK 2 (dua) sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah 157 unit KK dari target 150 unit KK (104,67%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,99%.
4. Kegiatan Kegiatan *Forest Programme III* – Sulawesi tahun 2022 mencapai 99,83% untuk sumber dana RMP dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.101.344.751,- dari pagu DIPA sebesar Rp.1.103.183.000,-. Adapun realisasi dana HLN tahun

2022 adalah 98,89% atau sebesar Rp.12.664.419.018,- dari pagu sebesar Rp.12.807.162.000,-. Realisasi RMP lebih tinggi dari HLN karena tidak terkendala kurs seperti halnya dana HLN. Sebagian besar output telah tercapai dengan rinciannya yakni: a) Output 1, terjaganya keutuhan TN Lore Lindu, b) Output 2, telah dilakukan rehabilitasi hutan di Sub DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Hulu Lariang, c) Output 3, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TN Lore Lindu dan Cagar Biosfer Lore Lindu, d) Output 4, telah terlaksana kegiatan kerja sama penelitian oleh Gottingen University, IPB University, dan Tadulako University yang melibatkan staf BBTN Lore Lindu, dengan semua turunan program yang mendukung tercapainya output 1, output 2 dan output 3 tersebut, dan e) Manajemen dan Operasional proyek dengan semua kegiatan di PEA tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Untuk capaian fisik sebagian besar output telah tercapai dengan rinciannya yakni: 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu (output 1), 2) Telah dilakukan rehabilitasi hutan di Sub DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Hulu Lariang (output 2), 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TN Lore Lindu dan Cagar Biosfer Lore Lindu, 4) Telah terlaksana kegiatan kerja sama penelitian oleh Gottingen University, IPB University, dan Tadulako University yang melibatkan staf BBTN Lore Lindu, dengan semua turunan program yang mendukung tercapainya output 1, output 2 dan output 3 tersebut, dan 5) Manajemen dan Operasional proyek dengan semua kegiatan di PEA tahun 2022 telah selesai dilaksanakan.

5. Capaian rata-rata IKK Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah 88,33% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,17%. Terkait besarnya anggaran, selama tahun 2022 terjadi *refocusing* anggaran pada kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi (di Direktorat RKK dan di UPT) yang mendukung pencapaian IKK 1 dan IKK 2. Berdasarkan penghitungan setelah refocusing anggaran, kegiatan Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi tersisa sebesar 75,07% dari anggaran awal. Jika target IKK 1 sebesar 5,4 juta hektar direkalkulasi terhadap besarnya refocusing anggaran maka menjadi sebesar 4,05 juta hektar dengan prosentase capaian IKK sebesar 102,22% dan jika target IKK 2 sebanyak 30 Unit KK direkalkulasi terhadap besarnya refocusing anggaran maka target menjadi sebanyak 23 Unit KK dengan prosentase capaian IKK sebesar 130,43%, sehingga rata-rata capaian IKK sebesar 116,33% dengan realisasi kegiatan Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi sebesar 98,25%. Dari rekalkulasi besaran target

tersebut di atas, dapat dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan prosentase realisasi anggaran dengan prosentase capaian IKK setelah dilakukan *refocusing*, maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,84 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja.

6. Berdasarkan penghitungan setelah *refocusing* anggaran pada pencapaian IKK 1, dengan prosentase capaian IKK 1 sebesar 102,22% dan prosentase realisasi anggaran IKK 1 sebesar 97,94%. Jika dilakukan analisis efisiensi pencapaian IKK 1, maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,95 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada IKK 1 Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja. Berdasarkan penghitungan setelah *refocusing* anggaran pada pencapaian IKK 2, dengan prosentase capaian IKK 2 sebesar 130,43% dan prosesntase realisasi anggaran IKK 2 sebesar 98,27%. Jika dilakukan analisis efisiensi pencapaian IKK 2 maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,75 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada IKK 1 Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja.
7. Beberapa hal dan langkah penting untuk menjadi arahan dan pertimbangan dalam pencapaian kinerja di masa mendatang agar berjalan efektif dan optimal, antara lain:
  - a. Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi sebagai berikut:
    - Melanjutkan Penyusunan/ Revisi NSPK.
    - Melakukan Bimbingan teknis, fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan koordinasi ke UPT/UPTD.
    - Monitoring dan evaluasi zona blok baik kantor UPT dan ke lokasi kawasan.
    - Penelaahan, penilaian dan rekomendasi pengesahan dokumen penataan kawasan.
  - b. Kegiatan Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi sebagai berikut:



- Melakukan pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif pelaksanaan IKK inventarisasi ke UPT melalui bimbingan teknis, konsultasi dan koordinasi.
  - Saat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, UPT didorong untuk memberikan output secara langsung, yaitu menginput data hasil inventarisasi dan verifikasi melalui *e-reporting*.
- c. Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagai berikut:
- Seluruh kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE, agar lebih memahami prinsip-prinsip, norma dan etika kerja sama, lebih selektif dalam menjalin memilih mitra kerja sama, aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra serta memperkuat komunikasi dan koordinasi.
  - Melakukan evaluasi khusus terhadap mitra-mitra yang memiliki kinerja buruk, terindikasi melanggar kode etik kerja sama, atau memperoleh dana dari donor atau negara yang tidak mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem.
  - Melakukan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.85/Menhut-II/2014 tentang Tatacara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.
  - Pihak atau mitra yang dapat diproses permohonan kerja samanya, baik terkait penguatan fungsi maupun pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, apabila:
    1. Tidak terlibat atau terafiliasi dengan organisasi terlarang atau berpotensi menimbulkan permasalahan SARA;
    2. Memberikan informasi jelas mengenai struktur organisasi dan personil yang terlibat di dalam organisasi, serta informasi mengenai sumber pendanaan yang digunakan dalam kegiatan perjanjian kerja sama.
    3. Khusus untuk mitra lembaga asing/internasional harus dipastikan bahwa lembaga dimaksud:
      - Tidak memiliki catatan buruk dalam forum Tim Pemantauan Ormas Asing (TPOA),
      - Aktivitasnya tidak memiliki kecenderungan menentang kebijakan Pemerintah Indonesia,

- Tidak didanai dari negara-negara yang memiliki kebijakan politik bertentangan dengan Pemerintah Indonesia
- Tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*fund raising*) di dalam negeri.

4. Pihak atau mitra dapat dipastikan:

- Tidak memanfaatkan perjanjian kerja sama dalam rangka perdagangan karbon, sepanjang belum ada peraturan perundangan yang mengatur terkait perdagangan karbon di KSA dan KPA.
- Tidak melakukan publikasi sepihak, tidak berimbang dan/atau yang dinilai dapat mendiskreditkan Pemerintah.
- Tidak melakukan kegiatan yang melampaui batas kewenangan (yurisdiksi) pemerintah dalam pengelolaan KSA dan KPA.
- Bersedia menyediakan anggaran sesuai komitmen dalam perjanjian kerja sama.
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi dan hanya dipergunakan untuk kepentingan bersama dengan pemerintah.

d. *Forest Programme* III-Sulawesi sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan secara matang untuk tahun kinerja 2023 dengan menyiapkan semua hal terkait persiapan pelaksanaan kegiatan di awal bulan Januari 2023, yang meliputi NoL, ToR, tata waktu kegiatan, pembayaran IC yang akan dilakukan di Bulan Februari dan September, serta memperhatikan perkembangan kurs dalam upaya peningkatan realisasi.
2. Aspek dokumentasi, pengarsipan, serta pencatatan segala aktivitas perlu ditingkat dengan optimal, terutama yang berkaitan dengan database FP III. Sistem rekapitulasi database serta penginputannya akan dilakukan berbasis aplikasi. Dalam hal ini, tahun 2023 FP III akan mengembangkan aplikasi monev berbasis IT dan sistem digital.
3. PEA FP III secara rutin berkoordinasi dengan PIU, Fasdes, Lembaga terkait serta mitra dalam upaya mengorkestrasi organisasi proyek FP III yang besar ini, serta secara optimal menindaklanjuti hasil – hasil MonEv Eksternal serta saran-saran oleh pihak ketiga.

Pencapaian IKK Direktorat RKK diharapkan dapat lebih baik lagi pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian IKK pada Direktorat RKK.





SUMBER FOTO & LOKASI : TN GUNUNG HALIMUN SALAR, JAYGEUX PHOTOGRAPH

# LAMPIRAN

---

Lampiran 1. Matriks Indikatif Kegiatan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

**Matriks Indikatif Kegiatan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024**  
**sesuai Surat Keputusan Direktur Perencanaan Nomor: SK.8/RKK/TU/KSA.0/2/2022**  
**tentang Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi)**

Program/Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem													
Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi													354.791
a	Direktorat (Pusat)							18.751	4.120	4.150	4.250	3.920	35.191
I	Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (27 Juta Hektar)	7,66	3,85	4,04	5,56	5,94	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
	Verifikasi Inventarisasi KK (Juta Ha)	7,66	3,85	4,04	5,56	5,94	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
II	Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	21.000
	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	7	8	12	12	12	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Rekomendasi Penataan KK dan/atau Penandaan Zona atau Blok (Dokumen)	30	30	30	30	30	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

	Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)	-	-	50	50	50	150	-	-	2.000	2.000	2.000	6.000
<b>III</b>	<b>Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)</b>	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
	Rekomendasi Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.000	2.000	4.000
	Rekomendasi Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.000	2.000	4.000
<b>IV</b>	<b>Forest Programme III Sulawesi (Direktorat RKK)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50.300</b>
	<i>Forest Programme III Sulawesi (Kegiatan)</i>	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300



Program/Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>b</b>	<b>UPT/Daerah</b>							<b>7.335</b>	<b>53.645</b>	<b>61.320</b>	<b>129.700</b>	<b>133.575</b>	<b>385.575</b>
<b>I</b>	<b>Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati (27 Juta Hektar)</b>	<b>7,66</b>	<b>3,85</b>	<b>4,04</b>	<b>5,56</b>	<b>5,94</b>	<b>27</b>	-	46.000	48.000	111.100	114.500	319.600
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Juta Ha)	7,66	3,85	4,04	5,56	5,94	27	-	36.000	38.000	51.100	54.500	179.600
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan/atau Permasalahan KK (Juta Ha)	16,20	0,83	0,50	4	5	27	-	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000
<b>II</b>	<b>Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi (150 unit KK)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>7.335</b>	<b>7.645</b>	<b>13.320</b>	<b>13.600</b>	<b>14.075</b>	<b>55.975</b>
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	7	8	12	12	12	51	350	400	600	600	600	2.550
	Penataan dan/atau penandaan zonasi/blok KK (Dokumen)	30	30	30	30	30	150	6.985	7.245	7.720	8.000	8.475	38.425
	Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)*	-	-	50	50	50	150	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000
<b>III</b>	<b>Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)**</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
	Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.500	2.500	5.000
	Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.500	2.500	5.000

\* Komponen kegiatan baru yang menjadi tanggung jawab Direktorat RKK tahun 2022-2024 yaitu Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.

\*\* Perubahan komponen Kerja Sama Penyelenggaraan KK menjadi IKK Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS) tahun 2023-2024.

Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target / Sub Komponen					
Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi							
a	Direktorat (Pusat)	2020	2021	2022	2023	2024	Total
I	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (27 Juta Ha)	7,66	3,85	4,04	5,56	5,94	27
051	Verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi (Dokumen)	A. Penyusunan NSPK					
		B. Koordinasi/Fasilitasi/Supervisi					
		C. Monev					
		D. Bimtek					
		E. Sosialisasi					
		F. Verifikasi data spasial dan non spasial					
II	Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
052	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan sosialisasi					
		C. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengukuhan kk					
		D. Monev dan supervisi					
053	Rekomendasi Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Dokumen)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan sosialisasi					
		C. Koordinasi dan konsultasi					
		D. Monev dan supervisi					
		E. Fasilitasi Penyusunan Revisi Penataan Zonasi/Blok KK					
		F. Fasilitasi Penilaian Rencana Penataan Zonasi/Blok KK					
		G. Fasilitasi Penandaan Tanda Zonasi/Blok KK					
054	Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK	A. NSPK					
		B. Bimtek dan sosialisasi					

		C. Koordinasi dan konsultasi					
		D. Monev dan supervisi					
		E. Fasilitasi penilaian penyusunan/revisi pengesahan rencana pengelolaan kawasan konservasi					
III	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)	-	-	-	50	50	100
055	Rekomendasi Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen)	A. Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama					
		B. Penyusunan/ Reviu NSPK Kerja Sama					
		C. Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama					
		D. Bimbingan Teknis/ <i>Coaching Clinic</i> Kerja Sama					
		E. Fasilitasi Kerja Sama (Pengecekan Lapangan, Pembahasan/ Penyusunan/ Penandatanganan PKS, RPP, RKT)					
		F. Monitoring Kerja Sama					
		G. Evaluasi Kerja Sama					
		H. Publikasi Hasil Kerja Sama					
056	Rekomendasi Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)	A. Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama					
		B. Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama					
		C. Bimbingan Teknis/ <i>Coaching Clinic</i> Kerja Sama					
		D. Fasilitasi Kerja Sama (Pengecekan Lapangan, Pembahasan/ Penyusunan/ Penandatanganan PKS, RPP, RKL, RKT)					
		E. Monitoring Kerja Sama					
		F. Evaluasi Kerja Sama					
		G. Publikasi Hasil Kerja Sama					
		H. Sistem Informasi Kerja Sama					
IV	Forest Program III Sulawesi (Direktorat RKK) (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1
051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek (Dokumen)	A. Audit Keuangan					
		B. Monitoring Internal dan Eksternal					
		C. <i>Workshop</i> Perencanaan					
		D. <i>Workshop</i> Evaluasi					



		<i>E. National Steering Committee Meeting</i>
		<i>F. Provincial Coordination Meeting</i>
		G. Publikasi Kegiatan FP III
		H. Honorarium PEA FP III
		I. Koordinasi Pelaksanaan FP III
		J. Fasilitasi Pelaksanaan FP III
		K. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FP III
052	Pelayanan Konsultan (Implementasi/Penelitian) (Dokumen)	A. Pembayaran Konsultan
053	Peningkatan Kapasitas (Dokumen)	A. Training/Workshop
		B. Studi Banding

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.  
Jabatan : Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.  
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.  
NIP. 19640930 198903 1 001



Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730323 199903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.  
Jabatan : Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi

Berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 November 2022



Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730323 199903 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi  
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK TAHUN 2022	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (RO)	RINCIAN OUTPUT (RO)
1	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (tahun 2020-2024: 27 Juta Hektar).	5,4 Juta Hektar	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan.	001-Rekomendasi kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan dan Kerja Sama Kawasan Konservasi.
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem.	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (tahun 2020-2024: 150 Unit KK).	30 Unit KK	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.	001-Hibah Luar Negeri Forest Programme III Sulawesi.
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan.	001-Rekomendasi kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan dan Kerja Sama Kawasan Konservasi. 002-Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektivitas.

Program/Kegiatan/Output	Anggaran Sebelum <i>Refocusing</i>	Anggaran Setelah <i>Refocusing</i> ke-1	Anggaran Setelah <i>Top up</i> HLN	Anggaran Setelah Realokasi Anggaran Blokir AA
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.				
6739. Perencanaan Kawasan Konservasi.				
6739. BDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.	Rp. 12.135.020.000,-	Rp. 12.135.020.000,-	Rp.13.910.345.000,-	Rp.13.910.345.000,-
6739. PBV. Kebijakan Bidang Kehutanan.	Rp. 3.725.698.000,-	Rp. 3.679.198.000,-	Rp. 3.679.198.000,-	Rp. 3.450.675.000,-
Total Anggaran	Rp. 15.860.718.000,-	Rp. 15.814.218.000,-	Rp.17.589.543.000,-	Rp.17.361.020.000,-



Pt. Direktur Jenderal,

Bambang Hendroyono, MM.  
NIP. 19640930 198903 1 001



Jakarta, 30 November 2022

Direktur

Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730323 199903 1 002

**RENCANA AKSI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi  
Tahun Anggaran : 2022

KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya penempatan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (tahun 2020-2024: 27 Juta Hektar)	5,4 Juta Hektar	0,98	Juta Hektar	1,47	Juta Hektar	1,47	Juta Hektar	1,47	Juta Hektar
				Tahapan : 1. Konsolidasi dan telaah data hasil inventarisasi kawasan konservasi tahun 2021; 2. Verifikasi data spasial dan non spasial hasil inventarisasi kawasan konservasi tahun 2021; 3. Konsolidasi data, verifikasi, bimbingan teknis dan supervisi penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi triwulan I tahun 2022; 4. Penyusunan data spasial dan non spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi triwulan I Tahun 2022 seluas 0,98 juta hektar.		Tahapan : 1. Konsolidasi dan telaah data hasil inventarisasi kawasan konservasi semester I tahun 2022; 2. Verifikasi data spasial dan non spasial hasil inventarisasi kawasan konservasi Semester I Tahun 2022; 3. Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi Semester I tahun 2022; 4. Penyusunan data spasial dan non spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi Semester I Tahun 2022 seluas 2,45 juta hektar.		Tahapan : 1. Konsolidasi dan telaah data hasil inventarisasi kawasan konservasi Triwulan III tahun 2022; 2. Verifikasi data spasial dan non spasial hasil inventarisasi kawasan konservasi Triwulan III Tahun 2022; 3. Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi Triwulan III tahun 2022; 4. Penyusunan data spasial dan non spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi Triwulan III Tahun 2022 seluas 3,92 juta hektar.		Tahapan : 1. Konsolidasi dan telaah data hasil inventarisasi kawasan konservasi Semester II tahun 2022; 2. Verifikasi data spasial dan non spasial hasil inventarisasi kawasan konservasi Semester II Tahun 2022; 3. Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi Semester II Tahun 2022; 4. Penyusunan data spasial dan non spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi Semester II Tahun 2022 seluas 5,4 juta hektar.	

KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2022	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (tahun 2020-2024: 150 Unit KK)	30 Unit KK	6	Unit KK	9	Unit KK	9	Unit KK	6	Unit KK
				Tercapainya komponen kegiatan untuk mendukung target sebesar 6 Unit KK, yaitu:		Tercapainya komponen kegiatan untuk mendukung target sebesar 9 Unit KK, yaitu:		Tercapainya komponen kegiatan untuk mendukung target sebesar 9 Unit KK, yaitu:		Tercapainya komponen kegiatan untuk mendukung target sebesar 6 Unit KK, yaitu:	
				a. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok sebanyak 5 dokumen.		a. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok sebanyak 9 dokumen.		a. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok sebanyak 12 dokumen.		a. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok sebanyak 12 dokumen.	
				b. Kerja Sama Penyelenggaraan KK sebanyak 4 dokumen.		b. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK sebanyak 2 dokumen.		b. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK sebanyak 1 dokumen.		b. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK sebanyak 2 dokumen.	
				c. Rencana Pengelolaan KK sebanyak 5 dokumen.		c. Kerja Sama Penyelenggaraan KK sebanyak 6 dokumen.		c. Kerja Sama Penyelenggaraan KK sebanyak 6 dokumen.		c. Kerja Sama Penyelenggaraan KK sebanyak 4 dokumen.	
						d. Rencana Pengelolaan KK sebanyak 5 dokumen.		d. Rencana Pengelolaan KK sebanyak 10 dokumen.		d. Rencana Pengelolaan KK sebanyak 10 dokumen.	

Jakarta, 30 November 2022

Direktur,



Alimad Munawir, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730323 199903 1 002



Lampiran 3. Data Capaian IKK 1.

**DATA LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIINVENTARISASI DAN  
DIVERIFIKASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI  
SECARA PARTISIPATIF DI DALAM KAWASAN KONSERVASI  
(27 JUTA HEKTAR) TAHUN 2022**

NO	UPT PENGELOLA	TARGET (ha)	CAPAIAN (ha)
1	BBKSDA JAWA BARAT	45.097	35.356
2	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	57.000	57.000
3	BBKSDA PAPUA	25.004	23.962
4	BBKSDA PAPUA BARAT	733.970	733.970
5	BBKSDA RIAU	21.213	10.900
6	BBKSDA SULAWESI SELATAN	92.071	84.909
7	BBKSDA SUMATERA UTARA	4.171	4.171
8	BBKSDA JAWA TIMUR	7.175	1
9	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	2.400	2.400
10	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	10	5
11	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	4.358	4.626
12	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	24.270	795
13	BBTN GUNUNG LEUSER	276.756	338.670
14	BBTN KERINCI SEBLAT	36.000	44.757
15	BBTN LORE LINDU	43.700	43.700
16	BBTN TELUK CENDERAWASIH	240.000	240.000
17	BKSDA BALI	6.243	6.284
18	BKSDA BENGKULU	10.203	7.547
19	BKSDA D.I YOGYAKARTA	600	600
20	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	144	2
21	BKSDA JAMBI	7.000	10.902
22	BKSDA JAWA TENGAH	3.055	20
23	BKSDA KALIMANTAN BARAT	247.112	91.775
24	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	25.000	25.000
25	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	3.744	3.744
26	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	46.900	0
27	BKSDA MALUKU	10.624	0
28	BKSDA NANGROE ACEH DARUSSALAM	31.262	31.262
29	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	56.000	56.000
30	BKSDA SULAWESI TENGGARA	41.000	41.000
31	BKSDA SULAWESI UTARA	46.169	5.698
32	BKSDA SUMATERA BARAT	1.000	1.027
33	BKSDA SUMATERA SELATAN	51	302
34	BKSDA ALAM SULAWESI TENGAH	380.000	3.000
35	BTN AKETAJAWA-LOLOBATA	57.000	42.000
36	BTN ALAS PURWO	14.256	14.256
37	BTN BALI BARAT	744	946

NO	UPT PENGELOLA	TARGET (ha)	CAPAIAN (ha)
38	BTN BALURAN	25.000	25.000
39	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	43.000	43.750
40	BTN BATANG GADIS	15.000	0
41	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	65.715	65.715
42	BTN BOGANI NANI WARTABONE	24.483	24.483
43	BTN BUKIT 12	8.000	8.000
44	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	25.117	12.927
45	BTN BUNAKEN	2	917
46	BTN GUNUNG CEREMAI	2.700	2.700
47	BTN GUNUNG HALIMUN	10.000	10.000
48	BTN GUNUNG MERAPI	2.121	121
49	BTN GUNUNG MERBABU	5.820	2.410
50	BTN GUNUNG PALUNG	21.600	36.628
51	BTN GUNUNG RINJANI	5.000	5.000
52	BTN KARIMUN JAWA	10.000	10.959
53	BTN KAYAN MENTARANG	12.000	6.000
54	BTN KELIMUTU	5.356	5
55	BTN KEP. SERIBU	44.472	1
56	BTN KEPULAUAN TOGEAN	13.330	15
57	BTN KOMODO	173.300	7
58	BTN KUTAI	89.572	88.670
59	BTN LORENTZ	150.000	150.000
60	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	45.624	43.488
61	BTN MANUSELLA	175.178	35.000
62	BTN MERU BETIRI	52.626	90
63	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	20.000	20.000
64	BTN SEBANGAU	100.000	100.000
65	BTN SIBERUT	44.284	44.503
66	BTN TAKA BONERATE	9.700	9.700
67	BTN TAMBORA	71.000	72.412
68	BTN TANJUNG PUTING	87.000	2.200
69	BTN TESSO NILO	14.000	1
70	BTN UJUNG KULON	35.000	35.000
71	BTN WAKATOBI	1.320.987	1.320.987
72	BTN WASUR	86.282	0
73	BTN WAY KAMBAS	241	18
<b>TOTAL</b>		<b>5.414.812</b>	<b>4.143.293</b>

Lampiran 4. Data Capaian IKK 2.

**DATA JUMLAH UNIT KAWASAN KONSERVASI YANG DILAKUKAN PEMANTAPAN (PRAKONDISI) STATUS DAN FUNGSI (150 UNIT KK) TAHUN 2020-2022**

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
1	CA Pananjung Pangandaran	Unit KK			1	BBKSDA Jawa Barat
2	CA Gunung Burangrang	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
3	CA Leuweung Sancang	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
4	CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
5	CA Telaga Warna	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
6	TWA Gunung Tampomas	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
7	SM Cikepuh	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
8	TB Masigit Kareumbi	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
9	TWA Jember	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Barat
10	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	Unit KK		1		BBKSDA Jawa Timur
11	CA Gunung Picis	Unit KK			1	BBKSDA Jawa Timur
12	CA Gunung Sigogor	Unit KK			1	BBKSDA Jawa Timur
13	CA Pulau Bawean	Unit KK			1	BBKSDA Jawa Timur
14	CA Pulau Sempu	Unit KK		1		BBKSDA Jawa Timur
15	TWA Gunung Baung	Unit KK	1			BBKSDA Jawa Timur
16	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Unit KK		1		BBKSDA Jawa Timur
17	SM Pulau Bawean	Unit KK			1	BBKSDA Jawa

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
						Timur
18	SM Pulau Nusa Barung	Unit KK			1	BBKSDA Jawa Timur
19	TWA Bipolo	Unit KK	1			BBKSDA Nusa Tenggara Timur
20	TWA Camplong	Unit KK	1			BBKSDA Nusa Tenggara Timur
21	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	Unit KK	1			BBKSDA Nusa Tenggara Timur
22	TWA Teluk Kupang	Unit KK		1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
23	CA Watu Ata	Unit KK	1			BBKSDA Nusa Tenggara Timur
24	SM Kateri	Unit KK		1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
25	CA Biak Utara	Unit KK		1		BBKSDA Papua
26	SM Danau Bian	Unit KK		1		BBKSDA Papua
27	TWA Teluk Youtefa	Unit KK		1		BBKSDA Papua
28	CA Pegunungan Tamrau Utara	Unit KK			1	BBKSDA Papua Barat
29	CA Pegunungan Wondiboy	Unit KK			1	BBKSDA Papua Barat
30	TWA Sorong	Unit KK			1	BBKSDA Papua Barat
31	CA Pegunungan Fakfak	Unit KK	1			BBKSDA Papua Barat
32	CA Pulau Batanta Barat	Unit KK			1	BBKSDA Papua Barat
33	CA Pulau Salawati Utara	Unit KK			1	BBKSDA Papua Barat
34	TWA Lau Debuk-debuk	Unit KK		1		BBKSDA Sumatera Utara
35	SM Barumon	Unit KK		1		BBKSDA Sumatera Utara
36	TWA Danau Matano	Unit KK		1		BBKSDA Sulawesi Selatan
37	TWA Nanggala III	Unit KK		1		BBKSDA Sulawesi Selatan
38	TWA Lejja	Unit KK		1		BBKSDA Sulawesi Selatan



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
39	TWA Malino	Unit KK			1	BBKSDA Sulawesi Selatan
40	TWA Buluh Cina	Unit KK	1			BBKSDA Riau
41	TWA Muka Kuning	Unit KK	1			BBKSDA Riau
42	SM Bukit Batu	Unit KK	1			BBKSDA Riau
43	SM Giam Siak Kecil	Unit KK	1			BBKSDA Riau
44	SM PLG Sebang	Unit KK			1	BBKSDA Riau
45	TN Zamrud	Unit KK		1		BBKSDA Riau
46	TWA air Rami I/II	Unit KK			1	BKSDA Bengkulu
47	TWA Bukit Kaba	Unit KK			1	BKSDA Bengkulu
48	TWA Danau Dendam Tak Sudah	Unit KK			1	BKSDA Bengkulu
49	TWA Seblat	Unit KK			1	BKSDA Bengkulu
50	CA Air Seblat	Unit KK			1	BKSDA Bengkulu Lampung
51	CA kepulauan Krakatau	Unit KK		1		BKSDA Bengkulu Lampung
52	TB Semidang Bukit Kabu	Unit KK		1		BKSDA Bengkulu Lampung
53	CA Danau Dusun Besar	Unit KK			1	BKSDA Bengkulu Lampung
54	TWA Angke Kapuk	Unit KK		1		BKSDA DKI Jakarta
55	SM Muara Angke	Unit KK			1	BKSDA DKI Jakarta
56	SM Paliyan	Unit KK	1			BKSDA DI Yogyakarta
57	TWA Gunung Selok	Unit KK	1			BKSDA Jawa Tengah
58	CA Toffo Kota Lambu	Unit KK		1		BKSDA Nusa Tenggara Barat
59	TWA Danau Rawa Taliwang	Unit KK	1			BKSDA Nusa Tenggara Barat
60	TWA Tanjung Tamba	Unit KK			1	BKSDA Nusa Tenggara Barat
61	CA Pulau Sangiang	Unit KK			1	BKSDA Nusa Tenggara Barat
62	CA Pedauh	Unit KK	1			BKSDA Nusa Tenggara Barat

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
63	TWA Batu Angus	Unit KK	1			BKSDA Sulawesi Utara
64	TWA Batu Putih	Unit KK	1			BKSDA Sulawesi Utara
65	CA Gunung Dua Sudara	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Utara
66	SM Gunung Manembo-nembo	Unit KK	1			BKSDA Sulawesi Utara
67	TWA Tirta Rimba / Air Jatuh	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tenggara
68	TWA Mangolo	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tenggara
69	CA Lamedae	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tenggara
70	TWA Bancea	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
71	TWA Wera	Unit KK	1			BKSDA Sulawesi Tengah
72	TWA Pulau Pasoso	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
73	CA Gunung Dako	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
74	CA Gunung Sojol	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
75	CA Gunung Tinombala	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
76	CA Morowali	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
77	CA Pamona	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
78	CA Pangli Binangga	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
79	CA Tanjung Api	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
80	SM Bakiriang	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
81	SM Lombuyan	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
82	SM Pati-pati	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
83	SM Pinjan/Tanjung Matop	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
84	SM Pulau Dolangan	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
85	SM Tanjung Santigi	Unit KK		1		BKSDA Sulawesi Tengah
86	SM Pagai Selatan	Unit KK			1	BKSDA Sumatera Barat
87	TWA Saibi Sarabua	Unit KK			1	BKSDA Sumatera Barat
88	TWA Gunung Permisan	Unit KK	1			BKSDA Sumatera Selatan
89	TWA Jering Menduyung	Unit KK	1			BKSDA Sumatera Selatan
90	SM Bentayan	Unit KK	1			BKSDA Sumatera Selatan
91	SM Dangku	Unit KK		1		BKSDA Sumatera Selatan
92	SM Isau-isau Pasemah	Unit KK	1			BKSDA Sumatera Selatan
93	SM Padang Sugihan	Unit KK	1			BKSDA Sumatera Selatan
94	CA Janthoi	Unit KK	1			BKSDA Aceh
95	TWA Kepulauan Banyak	Unit KK			1	BKSDA Aceh
96	SM Rawa Singkil	Unit KK		1		BKSDA Aceh
97	TB Lingga Isaq	Unit KK		1		BKSDA Aceh
98	CA Durian Luncuk I	Unit KK		1		BKSDA Jambi
99	CA Durian Luncuk II	Unit KK		1		BKSDA Jambi
100	TWA Gunung Api Banda	Unit KK			1	BKSDA Maluku
101	TWA Baning	Unit KK		1		BKSDA Kalimantan Barat
102	TWA Tanjung Keluang	Unit KK	1			BKSDA Kalimantan Tengah
103	SM Lamandau	Unit KK	1			BKSDA Kalimantan Tengah
104	TWA Pulau Bakut	Unit KK	1			BKSDA

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
						Kalimantan Selatan
105	TWA Pulau Kembang	Unit KK	1			BKSDA Kalimantan Selatan
106	CA Gunung Kentawan	Unit KK		1		BKSDA Kalimantan Selatan
107	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	Unit KK		1		BKSDA Kalimantan Selatan
108	SM Pleihari Tanah Laut	Unit KK		1		BKSDA Kalimantan Selatan
109	TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	Unit KK	1			BKSDA Kalimantan Selatan
110	CA Teluk Adang	Unit KK	1			BKSDA Kalimantan Timur
111	SM Pulau Semama	Unit KK		1		BKSDA Kalimantan Timur
112	TN Kerinci Seblat	Unit KK		1		BBTN Kerinci Seblat
113	TN Betung Kerihun	Unit KK		1		BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
114	TN Danau Sentarum	Unit KK		1		BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
115	TN Baluran	Unit KK		1		BTN Baluran
116	TN Bukit Baka Bukit Raya	Unit KK		1		BTN Bukit Baka Bukit Raya
117	TN Bukit Tiga Puluh	Unit KK			1	BTN Bukit Tiga Puluh
118	TN Gunung Ciremai	Unit KK		1		BTN Gunung Ciremai
119	TN Kayan Mentarang	Unit KK	1			BTN Kayan Mentarang
120	TN Kepulauan Togean	Unit KK	1			BTN Kepulauan Togean
121	TN Gunung Merbabu	Unit KK		1		BTN Merbabu
122	TN Meru Betiri	Unit KK		1		BTN Meru Betiri



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
123	TN Gunung Rinjani	Unit KK		1		BTN Gunung Rinjani
124	TN Gunung Tambora	Unit KK		1		BTN Tambora
125	TN Wakatobi	Unit KK		1		BTN Wakatobi
126	TN Sebangau	Unit KK			1	BTN Sebangau
127	TN Bogani Nani Wartabone	Unit KK	1			BTN Bogani Nani Wartabone
128	TN Alas Purwo	Unit KK		1		BTN Alas Purwo
129	TN Bali Barat	Unit KK	1			BTN Bali Barat
130	TN Bantimurung-Bulusaraung	Unit KK	1			BTN Bantimurung-Bulusaraung
131	TN Berbak	Unit KK	1			BTN Berbak
132	TN Sembilang	Unit KK		1		BTN Sembilang
133	TN Bromo Tengger Semeru	Unit KK	1			BBTN Bromo Tengger Semeru
134	TN Bukit Barisan Selatan	Unit KK	1			BBTN Bukit Barisan Selatan
135	TN Bukit Dua Belas	Unit KK		1		BTN Bukit Dua Belas
136	TN Gunung Gede Pangrango	Unit KK		1		BTN Gunung Gede Pangrango
137	TN Gunung Halimun Salak	Unit KK		1		BTN Gunung Halimun Salak
138	TN Gunung Leuser	Unit KK		1		BBTN Gunung Leuser
139	TN Gunung Merapi	Unit KK		1		BTN Gunung Merapi
140	TN Gunung Palung	Unit KK		1		BTN Gunung Palung
141	TN Karimunjawa	Unit KK		1		BTN Karimunjawa
142	TN Kelimutu	Unit KK	1			BTN Kelimutu
143	TN Kepulauan Seribu	Unit KK		1		BTN Kepulauan Seribu
144	TN Komodo	Unit KK		1		BTN Komodo
145	TN Kutai	Unit KK		1		BTN Kutai
146	TN Lore Lindu	Unit KK		1		BBTN Lore Lindu

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Nama UPT
147	TN Laiwangi Wanggameti	Unit KK	1			BTN Laiwangi Wanggameti
148	TN Tesso Nilo	Unit KK		1		BTN Tesso Nilo
149	TN Wasur	Unit KK		1		BTN Wasur
150	TN Way Kambas	Unit KK		1		BTN Way Kambas
151	Tahura Subulussalam/Lae kombih	Unit KK			1	Tahura Subulussalam
152	Tahura Sultan Adam	Unit KK		1		Tahura Sultan Adam
153	Tahura Bukit Rabang - Gluguran	Unit KK	1			UPTD Tahura Bukit Rabang - Gluguran
154	Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	Unit KK		1		UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci, Jawa Barat
155	Tahura Ngurah Rai	Unit KK			1	UPTD Tahura
156	Tahura Bukit Soeharto	Unit KK		1		UPTD Tahura
157	Tahura Sebatung	Unit KK		1		UPTD Tahura
<b>Total</b>			<b>49</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	

## Lampiran 5. Data Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok.

### DAFTAR ZONA/BLOK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI YANG DISAHKAN TAHUN 2022 (Capaian Komponen Kegiatan Per 1 Desember 2022)

No	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT	Nomor SK	Keterangan
1	THR	Tahura Tahura Ngurah Rai	Bali	UPTD Tahura Bali	SK.1113/KSDAE/Set.2/KSA.0/12/2021 tanggal 30 Desember 2021	Revisi
2	TB	TB Pulau Rempang	Kepulauan Riau	BBKSDA Riau	SK.24/KSDAE/SET.3/KSA.0/2/2022 tanggal 9 Februari 2022	Revisi
3	TN	TN Bukit Tiga Puluh	Riau	BTN Bukit Tiga Puluh	SK.28/KSDAE/SET.3/KSA.0/2/2022 tanggal 11 Februari 2022	Revisi
4	CA	CA Nusa Gede Panjalu	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.30/KSDAE/Set.3/KSA.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022	
5	CA	CA Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.29/KSDAE/Set.3/KSA.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022	
6	TN	TN Sebangau	Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	SK.65/KSDAE/Set.3/KSA.0/3/2022 tanggal 30 Maret 2022	Revisi
7	THR	THR Masigit/Kareu mbi	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.138/KSDAE/Set.3/KSA.0/6/2022 tanggal 30 Juni 2022	
8	CA	CA Pegunungan Tamrau Selatan	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.125/KSDAE/Set.3/KSA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022	
9	CA	CA Wondiboy	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.119/KSDAE/Set.3/KSA.0/6/2022 tanggal 7 Juni 2022	
10	CA	CA Pegunungan Kumawa	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.123/KSDAE/Set.3/KSA.0/6/2022 tanggal 7 Juni 2022	
11	TWA	TWA Malino	Suawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan	SK.124/KSDAE/Set.3/KSA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022	
12	TN	TN Gandang Dewata	Sulawesi Barat	BBKSDA Sulawesi Selatan	SK.133 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2022 tanggal 23 Juni 2022	
13	TN	TN Meru Betiri	Jawa Timur	BTN Meru Betiri	SK.157/KSDAE/SET.3/KSA.0/7/2022 tanggal 25 Juli 2022	Revisi
14	TWA	TWA Tanjung Tamba	NTB	BKSDA NTB	SK.161/KSDAE/SET/KSA.0/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022	Revisi
15	TN	TN Gunung Ciremai	Jawa Barat	BTN Gunung Ciremai	SK.193/KSDAE/SET/KSA.0/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022	Revisi
16	SM	SM Muara Angke	Jakarta	BKSDA DKI Jakarta	SK.215KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022	

Keterangan Zona/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi yang disahkan per 1 Desember 2022:

CA	: 5 unit KK/Dokumen
TB	: 2 unit KK/Dokumen
TN	: 5 unit KK/Dokumen
TWA	: 2 unit KK/Dokumen
THR	: 1 unit KK/Dokumen
SM	: 1 unit KK/Dokumen
Total	: 16 unit KK/Dokumen



## Lampiran 6. Data Rencana Pengelolaan KK.

### I. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Telah Disahkan

No	Nomor Register	Nama	Fungsi	Unit Pengelola	Provinsi	SK Dirjen	Tanggal Pengesahan	Periode RP
1.	100212114	CA Gunung Picis	CA	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Jawa Timur	SK.66/KSDAE/SET.3/KSA.1/3/2022	30 Maret 2022	2022 - 2031
2.	100212115	CA Gunung Sigogor	CA	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Jawa Timur	SK.66/KSDAE/SET.3/KSA.1/3/2022	30 Maret 2022	2022 - 2031
3.	100222080	SM Pulau Nusa Barung	SM	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Jawa Timur	SK.103/KSDAE/SET.3/KSA.1/5/2022	20 Mei 2022	2022 - 2031
4.	100212122	CA Pulau Bawean	CA	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Jawa Timur	SK.104/KSDAE/SET.3/KSA.1/5/2022	20 Mei 2022	2022 - 2031
5.	100222032	SM Pulau Bawean	SM	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Jawa Timur	SK.104/KSDAE/SET.3/KSA.1/5/2022	20 Mei 2022	2022 - 2031
6.	100251026	TWA Seblat	TWA	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	Bengkulu	SK.111/KSDAE/SET.3/KSA.0/5/2022	27 Mei 2022	2023 - 2032
7.	100211037	CA Air Seblat Reg. 89	CA	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	Bengkulu	SK.111/KSDAE/SET.3/KSA.0/5/2022	27 Mei 2022	2023 - 2032
8.	100211223	CA Air Rami I Reg.87 dan CA Air Rami II Reg. 87A	CA	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	Bengkulu	SK.111/KSDAE/SET.3/KSA.0/5/2022	27 Mei 2022	2023 - 2032
9.	100217205	CA Salawati Utara	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat	SK.134/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2022	23 Juni 2022	2022 - 2031

No	Nomor Register	Nama	Fungsi	Unit Pengelola	Provinsi	SK Dirjen	Tanggal Pengesahan	Periode RP
10.	100257121	TWA Sorong	TWA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat	SK.135/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2022	23 Juni 2022	2022 - 2031
11.	100217207	CA Pegunungan Tamrau Utara	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat	SK.136/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2022	23 Juni 2022	2022 - 2031
12.	100241005	TN Bukit Tiga Puluh	TN	Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Riau, Jambi	SK.184/KSDAE/SET.3/KSA.0/9/2022	27 September 2022	2022 - 2031
13.	100261028	Tahura Lae Kombih	Tahura	Pemerintah Kota Subulussalam	Aceh	SK.199/KSDAE/SET.3/KSA.0/10/2022	25 Oktober 2022	2023 - 2032
14.	100213135	CA Pulau Sangiang (RTK.86)	CA	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	SK.201/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2022	07 November 2022	2023 - 2032
15.	100217202	CA Pulau Batanta Barat	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat	SK.216/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2022	27 Desember 2022	2023 - 2032

## II. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Dalam Proses Pengesahan Dirjen KSDAE

No	Nomor Register	Nama	Fungsi	Unit Pengelola	Provinsi	Nomor Nota Dinas Pengantar
1.	100221006	SM Balai Raja	SM	Balai Besar KSDA Riau	Riau	ND.590/RKK/IPKK/KSA.0/12/2022 tanggal 26 Desember 2022
2.	100221012	SM PLG Sebang	SM	Balai Besar KSDA Riau	Riau	ND.591/RKK/IPKK/KSA.0/12/2022 tanggal 26 Desember 2022

3.	100255107	TWA Malino	TWA	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	ND.592/RKK/IPKK/KSA.0/12/2022 tanggal 26 Desember 2022
4.	100221079	SM Pulau Pagai Selatan	SM	Balai KSDA Sumatera Barat	Sumatera Barat	ND.606/RKK/IPKK/KSA.0/12/2022 tanggal 30 Desember 2022
5.	100251129	TWA Saibi Sarabua	TWA	Balai KSDA Sumatera Barat	Sumatera Barat	ND.607/RKK/IPKK/KSA.0/12/2022 tanggal 30 Desember 2022

### III. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Dalam Perbaikan UPT

No	Nomor Register	Nama Kawasan	Fungsi	Unit Pengelola	Provinsi
1.	100241004	TN Tesso Nilo	TN	Balai TN Tesso Nilo	Riau
2.	100244035	TN Tanjung Puting	TN	Balai TN Tanjung Puting	Kalimantan Tengah
3.	100231003	TB Pulau Rempang	TB	Balai Besar KSDA Riau	Riau
4.	100255109	TWA Sidrap	TWA	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
5.	100212095	CA Pagerwunung Darupono	CA	Balai KSDA Jawa Tengah	Jawa Tengah
6.	100215171	CA Tanjung Panjang	CA	Balai KSDA Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
7.	100253065	TWA Rawa Taliwang	TWA	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
8.	100217201	CA Pegunungan Wondiboy	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat
9.	100217203	CA Torobi	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat
10.	100217198	CA Pegunungan Kumawa	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat
11.	100217227	CA Waigeo Barat	CA	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat
12.	100263017	Tahura Ngurah Rai	Tahura	Balai Tahura Ngurah Rai	Bali

Lampiran 7. Data Kerja Sama Penyelenggaraan KK (PKS) Tahun 2022.

**A. Perjanjian Kerja Sama Penguatan Fungsi KK Tahun 2022**

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
	<b>Januari 2022</b>							
1	Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta	Balai KSDA Yogyakarta	SM Sermo SM Paliyan	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pengelolaan Pusat Penyelamatan Satwa dan Konservasi Satwa Liar di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta	Baru	PKS.53/K.22/TU/LK/12/2021 dan 05/PKS/YKAY/VII/2021  tanggal 28 Desember 2022	Yayasan	1 Tahun (28 Desember 2021-31 Oktober 2022)
2	Yayasan Orangutan Sumatera Lestari (YOSL)	Direktur Jenderal KSDAE	Balai Besar KSDA Sumatera Utara Balai KSDA Aceh	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Melalui Dukungan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya, Primata Dilindungi dan Beruang Madu di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Perpanjangan	PKS.1/KSDAE/RKK/KSA.0/1/2022 dan 01/MoU/YOSL/I/2022  tanggal 24 Januari 2022	Yayasan	5 Tahun (24 Januari 2022-24 Januari 2027)
3	Yayasan Orangutan Sumatera Lestari (YOSL)	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	Wilayah kerja KSDA Sumatera Utara	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya, Primata Dilindungi dan Beruang Madu di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara	Perpanjangan	PKS.366/K.3/TU/PK/1/2022 dan 05/PKS/YOSL/I/2022  tanggal 24 Januari 2022	Yayasan	5 Tahun (24 Januari 2022-24 Januari 2027)
4	Yayasan Orangutan Sumatera	Balai KSDA Aceh	Wilayah kerja KSDA Aceh	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya, Primata Dilindungi dan	Perpanjangan	PKS.01/K.20/TU/KSA.0/2022 dan 04/PKS/YOSL/I/2022	Yayasan	5 Tahun (24 Januari 2022-24 Januari



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
	Lestari (YOSL)			Beruang Madu di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh		tanggal 24 Januari 2022		2027)
5	Pemilik Warung Kopi Gunung	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Cimanggu	Penguatan Fungsi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pengembangan Wisata Alam di Taman Wisata Alam Cimanggu	Perpanjangan	PKS.1/K.1/TU/TU.2/1/2022 dan WKG/PKS.2/01.22 tanggal 19 Januari 2022	Perorangan	3 Tahun (19 Januari 2022-19 Januari 2025)
<b>Februari 2022</b>								
6	Yayasan Panata Giri Raharja	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Cimanggu	Kerja Sama Penguatan Fungsi Melalui Dukungan Pemulihan Ekosistem dan Penguatan Kelembagaan di Taman Wisata Alam Cimanggu	Baru	PKS.02/K.1/TU/TU.2/1/2022 dan 025/YPGR/I/2022 tanggal 27 Januari 2022	Yayasan	5 Tahun (27 Januari 2022-27 Januari 2027)
7	PT. Flobamor	Balai TN Komodo	TN Komodo	Penguatan Fungsi Berupa Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Kawasan dan Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo	Baru	PKS.1/T.17/TU/REN/2/2022 dan 01/FLB-PKS/II/2022 tanggal 4 Februari 2022	Badan Usaha	5 Tahun (4 Februari 2022-4 Februari 2027)
8	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, Kementerian Pertanian	Balai Besar KSDA Papua	Wilayah Kerja KSDA Papua	Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, Sumber Daya Genetik, Produk Rekayasa Genetik, dan Jenis Asing Invasif di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran di Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, Provinsi Papua	Baru	PKS.15/K.4/TU/KSA/2/2022 dan 482/HM.210/K.22.B/2/2022 tanggal 4 Februari 2022	Instansi	5 Tahun (4 Februari 2022-4 Februari 2027)

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
9	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, Kementerian Pertanian	Balai Besar KSDA Papua	Wilayah Kerja KSDA Papua	Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, Sumber Daya Genetik, Produk Rekayasa Genetik, dan Jenis Asing Invasif di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran di Wilayah Kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, Provinsi Papua	Baru	PKS.18/K.4/TU/KSA/2/2022 dan 132./HK.220/K.49.D/2/2022 tanggal 4 Februari 2022	Instansi	5 Tahun (4 Februari 2022-4 Februari 2027)
10	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika, Kementerian Pertanian	Balai Besar KSDA Papua	Wilayah Kerja KSDA Papua	Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, Sumber Daya Genetik, Produk Rekayasa Genetik, dan Jenis Asing Invasif di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran di Wilayah Kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika, Provinsi Papua	Baru	PKS.17/K.4/TU/KSA/2/2022 dan 068/HK.220/K.46.D/02/2022 tanggal 4 Februari 2022	Instansi	5 Tahun (4 Februari 2022-4 Februari 2027)
11	Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)	Direktur Jenderal KSDAE	BBKSDA Riau BTN Way Kambas	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Melalui Dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Balai Taman Nasional Way Kambas	Baru	PKS.3/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2022 dan 1016/YAPEKA/II/2022 tanggal 18 Februari 2022	Yayasan	5 Tahun (18 Februari 2022-18 Februari 2027)
12	Direktur Jenderal Cipta Karya, KemenPUPR	Direktur Jenderal KSDAE	TN Alas Purwo	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Taman Nasional Alas Purwo	Baru	PKS.1/KSDAE/RKK/KSA.0/1/2022 dan HK.0101-DC/63 tanggal 24 Januari 2022	Kementeri an/Lemba ga	5 Tahun (24 Januari 2022-24 Januari 2025)
<b>Maret 2022</b>								

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
13	PT. Dua Putra Perkasa Pratama	Balai KSDA Bengkulu	TWA Way Hawang	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Sert Pemasangan Pipa Instalasi Air di TWA Way Hawang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu	Perpanjangan	PKS.457/K.10/TU/PKS/03/2022 dan 059/HRD/DPP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022	Badan Usaha	5 Tahun (23 Maret 2022-23 Maret 2027)
<b>Mei 2022</b>								
14	PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	Wilayah TN Gunung Gede Pangrango	Jasa Asurasni Pengunjung Wisata dan Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Perpanjangan	PKS.04/BBTNGGP/TU.1/4/2022 dan 001/PKS-AGA-DIR/IV/2022 tanggal 27 April 2022	Badan Usaha	5 Tahun (27 April 2022-27 April 2027)
<b>Juni 2022</b>								
15	Pangulu Nagori Marubun Lökkung	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	CA dan TWA Dolok Tinggi Raja	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi berupa Pemasangan/Penanaman Pipa Instalasi Air Melintasi Kawasan Cagar Alam (CA) dan Taman Wisata Alam (TWA) Dolok Tinggi Raja	Baru	PKS.2132/K.3/TU/PK/4/2022 dan 470/122/20.05/2022 tanggal 27 April 2022	Pemerintah Daerah	5 Tahun (27 April 2022-27 April 2027)
16	Universitas Nusa Cendana	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	Wilayah kerja KSDA NTT	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Baru	PKS.224/K.5/TU/KUM.3/6/2022 tanggal 22 Juni 2022	Lembaga Pendidikan	5 Tahun (22 Juni 2022-22 Juni 2027)
17	Universitas Nusa Cendana	Balai TN Komodo	Resort Loh Buaya, Resort Loh Baru, Resort Loh Liang, Resort Loh Wau, Resort Loh Sebita	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Baru	PKS.5/T.17/TU/REN/6/2022 dan 1198/UN15.19/KL/2022 tanggal 22 Juni 2022	Lembaga Pendidikan	5 Tahun (22 Juni 2022-22 Juni 2027)

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
18	Universitas Nusa Cendana	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Resort Waimanu, Taman Mas, Tanah Daru, Kambata Wundut, Wudipandak, Tawui, Tandulajangga dan Wanggameti	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Baru	PKS.1156/T.28-TU/KSA.0/6/2022 dan 1200/UN15.18/KL/2022 tanggal 22 Juni 2022	Lembaga Pendidikan	5 Tahun (22 Juni 2022-22 Juni 2027)
19	Universitas Nusa Cendana	Balai TN Kelimutu	Resort Wolojita, Resort Niowula, Resort Detusoko	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Kelimutu Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Baru	PKS.49/T.40/TU/KSA.5/6/2022 dan 1199/UN15.19/KL/2022 tanggal 22 Juni 2022	Lembaga Pendidikan	5 Tahun (22 Juni 2022-22 Juni 2027)
<b>Juli 2022</b>								
20	Taman Safari Indonesia	Balai TN Wakatobi	Wilayah Kerja TN Wakatobi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Pelestarian Burung Kacamata Wangi-Wangi ( <i>Zosterops sp.nov</i> ) Pada Wilayah Kerja Balai TN Wakatobi	Baru	PKS.1038/T.21/TU/PK/06/2022 dan 06/PKS/TSI/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022	Badan Usaha	5 Tahun (17 Juni 2022 dan 17 Juni 2027)
21	PT. Semen Padang	Balai KSDA Sumatera Barat	SM Tarusan Arau Hilir	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan di Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Provinsi Sumatera Barat	Baru	PKS.1288/K.9/TU/KSA/7/2022 dan 0000061/SM.09.01/PJJ/50003503/3000/07.2022 tanggal 19 Juli 2022	Badan Usaha	5 Tahun (19 Juli 2022-19 Juli 2027)
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok	Balai TN Gunung Rinjani	Resort Sembalun, SPTN Wilayah II	Penguata Fungsi Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Melalui Kegiatan Peningkatan Akses Wisata Pendakian	Baru	PKS.07/T.39/TU/PKS/3/2022 dan 600/179/PU/2022 tanggal 28 Maret 2022	Instansi	5 Tahun (28 Maret 2022-28 Maret 2027)



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
	Timur							
23	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, Provinsi Kalimantan Barat	Balai KSDA Kalimantan Barat	Wilayah Kerja KSDA Kalimantan Barat	Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, Sumber Daya Genetik, Produk Rekayasa Genetik, dan Jenis Asing Invasif di Provinsi Kalimantan Barat	Baru	PKS. 01/BKSDA.KALBAR/HM S/5/2022 PKS. 1633/HM.210/K.16.B/0 5/2022 PKS. 525/HM.210/K.38.D/0 5/2022 tanggal 31 Mei 2022	Instansi	5 Tahun (31 Mei 2022-31 Mei 2027)
	<b>Agustus 2022</b>							
24	PT. Kapuas Prima Coal Tbk	Balai KSDA Kalimantan Tengah	SM Lamandau	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pemulihan Ekosistem di Suaka Margasatwa Lamandau	Baru	PKS.11/K.15/TU/KSA/8 /2022 dan 021/KPC-JKT-PKS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022	Badan Usaha	5 Tahun (23 Agustus 2022-23 Agustus 2026)
	<b>Oktober 2022</b>							
25	Yayasan KAHIU	Balai TN Tanjung Putting	Wilayah Kerja TN Tanjung Putting	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Melalui Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Tanjung Putting	Baru	PKS.63/K.18/TU/PK/6/ 2022 dan 001/E/KAHIU/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022	Yayasan	5 Tahun (20 Juni 2022-20 Juni 2027)
26	PT. Barokah Wisata Guci	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Guci		Baru		Badan Usaha	
27	PT. OKI Pulp & Paper Mills	Balai KSDA Sumatera	SM Padang Sugihan	Perubahan Atas Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS.1150/K.12/TU/REN/7/2020 dan Nomor 09/CAD-OKI/EM/07/2020 tentang Penguatan	Adendum PKS		Badan Usaha	

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
		Selatan		Fungsi Berupa Dukungan Pemulihan Ekosistem dan Penanggulangan Kebakaran di Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan				
	<b>November 2022</b>							
28	SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd	Balai KSDA Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur	Penguatan Fungsi Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Melalui Dukungan Program Pemulihan Ekosistem	Baru	PKS.419/K.11/TU/Pkh/11/2022 dan 018/MoU/COD/2022 tanggal 22 November 2022	Badan Usaha	3 Tahun (22 November 2022-22 November 2025)
	<b>Desember 2022</b>							
29	PT. Purinusa Ekapersada	Direktur Jenderal KSDAE	Balai Besar KSDA Riau Balai KSDA Sumatera Selatan Balai KSDA Jambi Balai KSDA Kaltim Balai TN Berbak dan Sembilang	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang	Baru	PKS.5/KSDAE/RKK/KSA.0/12/2022 dan 71/SSE-JKT/APP/12/2022 tanggal 7 Desember 2022	Badan Usaha	3 Tahun (7 Desember 2022-7 Desember 2025)
30	APP Sinar Mas (PT. Indah Kiat Pulp & Paper)	Balai Besar KSDA Riau	SM Bukit Rimbang Bukit Baling, SM Bukit Batu, SM Giam Siak Kecil, SM Kerumutan, PLG Sebang	Penguatan Fungsi Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, SM Bukit Batu, SM Giam Siak Kecil, SM Kerumutan, PLG Sebang Melalui Dukungan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati	Baru	PKS.2922/K.6/BTU/KUM.3/12/2022 dan 72/SSE-JKT/APP/PAKS/12/2022 tanggal 7 Desember 2022	Badan Usaha	3 Tahun (7 Desember 2022-7 Desember 2025)

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu
31	APP Sinar Mas (PT. Oki Pulp & Paper)	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Padang Sugihan	Penguatan Fungsi Kawasan SM Padang Sugihan dan Sekitarnya Melalui Dukungan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Serta Pemulihan Ekosistem	Baru	PKS.2844/K.12/TU/REN/12/2022 dan 74/SSE-JKT/APP/PKS/12/2022 tanggal 7 Desember 2022	Badan Usaha	3 Tahun (7 Desember 2022-7 Desember 2025)
32	APP Sinar Mas (PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper)	Balai KSDA Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur	Penguatan Fungsi Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Melalui Dukungan Pemulihan Ekosistem dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Baru	PKS.449/K.11/TU/PKH/12/2022 dan 73/SSE-JKT/APP/PKS/12/2022 tanggal 7 Desember 2022	Badan Usaha	3 Tahun (7 Desember 2022-7 Desember 2025)
33	APP Sinar Mas (PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk)	Balai KSDA Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang	Penguatan Fungsi Kawasan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur	Baru	PKS.205/K.18/TU/PK/12/2022 dan 76/SSE-JKT/APP/PKS/12/2022 tanggal 7 Desember 2022	Badan Usaha	3 Tahun (7 Desember 2022-7 Desember 2025)
34	APP Sinar Mas (PT. Oki Pulp & Paper)	Balai TN Berbak dan Sembilang	Wilayah Kerja TN Berbak dan Sembilang	Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Sembilang Melalui Perlindungan, Pemantauan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Konservasi Harimau Sumatera	Baru	PKS.33/T.10/TU/KSA/12/2022 dan 75/SSE-JKT/APP/PKS/12/2022 tanggal 7 Desember 2022	Badan Usaha	3 Tahun (7 Desember 2022-7 Desember 2025)

## B. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis KK Tahun 2022

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
Januari 2022							
1	Kalimantan Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Timur	Direktur PT Etam Manunggal Jaya	S.689/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2021 tgl 14 September 2021	01-Jan-22	Pemanfaatan Jalan Eksisting sepanjang 8,2 Km di Tahura Bukit Soeharto	Jalan
2	Kalimantan Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur	Direktur PT Delima Mustika Prima	No.S.645/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 27 Agustus 2021	01-Jan-22	Pemanfaatan Jalan Eksisting sepanjang 8 Km dan Pelabuhan seluas 30 Ha di Tahura Bukit Soeharto	Jalan
3	Bali	Dishut dan LH Prov. Bali	Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN (Persero)	S.822/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 25 Okt 2021	No.522/20/TAHURA /DKLH/2022 dan No.001.MoU/HKM. 02.01/ C36000000/2022 Tgl 20-01-2022	Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan kawasan Tahura Ngurah Rai untuk SUTT 150 kV Nusa Dua 0 Pesanggaran - Sanur seluas 36,52 Ha (Gardu Induk Nusa Dua 0,67 Ha, Jaringan Listrik Pesanggaran Nusa Dua 30,99 Ha, Jaringan Listrik Pesanggaran - Sanur Kauh 4,86 Ha)	SUTT
4	Jambi	BB TN Kerinci Seblat	GM PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Tengah (SBT)	S.1307/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2022 Tgl 10 Nov 2022	20 Des 2022	Perpanjangan PKS SUTT 150 kV Jalur Bangko-Merangin-Sungai Penuh di Zona Rehabilitasi Kawasan TNKS (11 Tapak Tower & Ruang Bebas/ROW)	SUTT
5	Kalimantan Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur	Direktur PT Indomas Karya Jaya	S.1012/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 Tgl 30 Oktober 2020	01 Januari 2022	Pemanfaatan Jalan eks HPH sepanjang 8 Km dan Dermaga 30 Ha di Tahura Bukit Soeharto	Jalan & Dermaga



No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
6	Sumatera Utara	Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara	Dirjen Bina Marga, an. Menteri PUPR	S.1046/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2021 Tgl 31 Des 2021	No.592.32/0071/DI SHUT-PGH/2022 - No.HM.0501-Bb2/058 Tgl 10 Januari 2022	Pembangunan Kantilever Jalan Medan - Berastagi di TAHURA Bukit Barisan seluas 3.995,55 m <sup>2</sup> (0,40 Ha) dg rincian - Titik 10 panjang 175 m lebar 7,35 m (1.286,25 m <sup>2</sup> ) - Titik 12 panjang 150 m lebar 9,39 m (1.408,50 m <sup>2</sup> ) - Titik 13 panjang 150 m lebar 8,672 m (1.300,8 m <sup>2</sup> )	Jalan
7	Sumatera Selatan	BTN Berbak Sembilang	Kuasa Direktur PT Rimba Hutani Mas	S.804/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 1 Nov 2021	24 Januari 2022	Perpanjangan Kerja sama antara Balai TN Berbak dan Sembilang dg PT RHM	Alur Perairan
8	Sumatera Selatan	BTN Berbak Sembilang	Direktur PT Tri Pupa Jaya	S.830/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 25 Okt 2021	24 Januari 2022	Perpanjangan Kerja sama antara Balai TN Berbak dan Sembilang dg PT TPJ	Alur Perairan
<b>Februari 2022</b>							
9	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kep. Mentawai	S.819/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 25 Okt 2021	No.PKS.319/K.9/TU /KSA/2/2022 dan No.440/20/Dinkes/I/2022 Tgl 14 Feb 2022	Kerja sama pembangunan RS Pratama Siberut seluas 1,56 Ha di TWA Saibi Sarabua	Rumah Sakit
10	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	Bupati Kep. Mentawai	S.862/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 Tgl 4 Nov 2021	No.PKS.318/K.9/TU /KSA/2/2022 dan No.620/120/DPUPR /II/2022 Tgl 14 Feb 2022	Kerja sama Jalan Trans Mentawai Ruas Jalan Mapinang-Surat Aban di P. Pagai Selatan (P=12.100 m / 18,15 Ha) dan di TWA Saibi Sarabua	Jalan
11	Bali	Dishut dan LH Prov. Bali	Walikota Denpasar	S.111/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2022 Tgl 18 Feb 2022	Nomor : 0.21.522/53/TAHUR A/DKLH/2022 dan	Pembangunan TPST seluas 95 are di TPA Serbagita Suwung di Tahura Ngurah Rai	TPA/ TPST

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
					Nomor : 660.2/603/DLHK/20 22 Tgl 21 Februari 2022		
<b>April 2022</b>							
12	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali GM PT PLN (Persero) UID Jawa Barat	S.350/KSDAE/RKK/KSA.0/3/2022 Tgl 31 Mar 2022	Tgl 13 April 2022	Adendum PKS Pemasangan Jaringan SUTM di TB Gunung Masigit Kareumbi dan CA Gunung Simpang	SUTM
13	Kalimantan Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur	Direktur PT Kaltim Batumanunggal	S.366/KSDAE/RKK/KSA.0/3/2022 Tgl 31 Maret 2022	Tgl 1 April 2022	Perpanjangan PKS Pemanfaatan Jalan dan Dermaga Eks HPH di TAHURA Bukit Soeharto, a.n. PT Kaltim Batumanunggal sepanjang 8 Km dan Dermaga 30 Ha	Jalan & Dermaga
14	Bali	Dishut dan LH Prov. Bali	Direktur PT Dewata Energi Bersih	S.372/KSDAE/RKK/KSA.0/3/2022 Tgl 31 Maret 2022	No.B.21.522/1514/P4H-KSDAE/DLHK - No.010.AGR.DEB-DKLH.LGL.04-22 Tgl 27 April 2022	Pembangunan Infrastruktur Terminal Penerima Energi (LNG) sbg Fasilitas Pendukung PLTG Pesanggaran seluas 24 Ha di TAHURA Ngurah Rai	Terminal LNG
15	Gorontalo	BTN Bogani Nani Wartabone	Dirjen Bina Marga, an. Menteri PUPR	S.939/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 Tgl 30 Nov 2021	No.PKS.444/BTNBN W-1/KK/3/2022 dan No.0201/Bb15/312 Tgl 8 April 2022	Peningkatan dan Penanganan Jalan Nasional Duloduo-Molibagu sepanjang 3.427,08 m (3,4 Km) di TN Bogani Nani Wartabone	Jalan
<b>Juli 2022</b>							
16	Maluku	BTN Manusela	General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku	S.646/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2022 Tgl 15 Juni 2022	No. PKS.447/T.48/TU/U M/07/2022 -	Pembangunan JTM 20 kV Kec. Seram Utara dan Seram Utara Barat di TN Manusela di Kabupaten Maluku Tengah	JTM 20 kV

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
			dan Maluku Utara (UIW MMU)		No.0040.Pj/HKM.02 .01/C17000000/202 2 Tgl 20 Juli 2022	- Jaringan Interkoneksi Pasahari-Wahai-Oleng sepanjang 10 Km - JTM Saleman sepanjang 4,3 Km	
17	Sulawesi Selatan	BTN Takabonerate	General Manager Area IV PAMASUKA PT Daya Mitra Telekomunikasi	S.501/KSDAE/RKK/KSA.0/5/2022 Tgl 18 Mei 2022	No.PKS.600/TU/SET /7/2022 - No.TEL.025/HK810/DJMT_1065000/20 22 Tgl 15 Juli 2022	Kerja sama penempatan 4 menara BTS di TN Takabonerate, Desa Rajuni, Desa Tarupa, Desa Jinato, dan Desa Khusus Pasitallu Kec. Taka Bonerate, Kab. Selayar, Sulawesi Selatan ukuran @ 18x18 m (324m2) atau luas total 1.296 m2	BTS
18	Maluku	BTN Manusela	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	S.925/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 Tgl 11 Nov 2020	Tgl 13 Juli 2022	Permohonan PKS Penyelenggaraan Jalan Nasional melewati TN Manusela di Pulau Seram Prov. Maluku	Jalan
Agustus 2022							
19	Kalimantan Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur	Direktur PT Batuah Energi Prima	No.S.774/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2022 Tgl 21 Juli 2022	Tgl 19 Agustus 2022	Permohonan kerja sama pemanfaatan jalan eksisting (eks HPH) sepanjang ±11,95 km dan dermaga eksisting seluas ±14,65 hektare di kawasan TAHURA Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Jalan & Dermaga
20	Kalimantan Selatan	BKSDA Kalimantan Selatan	Chief Executive Officer PT Arutmin Indonesia	S.761/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2022 Tgl 19 Juli 2022	Tgl 15 Agustus 2022	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang (CATK) seluas ±37 ha, akses jalan 0,2 km, alur perairan 2,3 km untuk Keperluan Penimbunan dan Pelabuhan Muat Batubara Air Tawar dan Sembilang di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan	Dermaga

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
						Selatan	
21	Riau	BBKSDA Riau	VP Corporate Affair PT Pertamina Hulu Rokan	S.631/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2022 Tgl 13 Juni 2022	Tgl; 18 Agustus 2022	Kerja sama sumur eksisting dan sarana penunjangnya di SM Balai Raja, TWA Sungai Dumai, SM PLG Sebanga di KSDA Riau	Sumur dan Sapras Pendukung Riau
<b>September 2022</b>							
22	Lampung	BB TN Bukit Barisan Selatan	GM Frequency & Government Management PT XL Axiata Tbk (EXCL)	S.292/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 Tgl 6 April 2021	Tgl 22 Sept 2022	Kerja sama Penanaman Kabel Optik PT XL Axiata Tbk di TN Bukit Barisan Selatan sepanjang Jalan Liwa-Krui (11 Km) lebar 0,05 m (550m2)	BTS
23	Gorontalo	BTN Bogani Nani Wartabone	SVP-Head of Network Deployment Indosat Ooredoo	S.1045/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2021 Tgl 31 Des 2021	Tgl 24 Sept 2022	Pembangunan / Penempatan Jaringan Fiber Optik melintasi TNBNW Ruas Jalan Duloduo-Molibagu sepanjang 3.375,11 meter di Kab. Bolaang Mongondow Selatan di TN Bogani Nani Wartabone	Fiber Optik
24	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara	Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR	S.697/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2022 Tgl 30 Juni 2022	Tgl 19 September 2022	Permohonan PKS Jalan Nasional di CA Panua dan CA Tangale di Gorontalo	Jalan



No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
25	Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Bupati Wakatobi kepada Menteri LHK c.q. Direktur Jenderal KSDAE	S.856/KSDAE/RKK/KSA.0/8/2022 Tgl 9 Agustus 2022	No.PKS.1963/T.21/T U/KP/09/2022 - No.523.43/AD-PKS/16/PEMKAB/VI II/2022 tanggal 16 September 2022	Permohonan Addendum Kerja Sama Pembangunan Dermaga Pelelangan/ Pendaratan Ikan/SBPT Numana berupa tambahan kegiatan pengembangan Dermaga Rukuwa Binongko berupa Pembangunan Pemecah Gelombang (Breakwater)	Break Water
26	Bali	Dishut dan LH Prov. Bali	Direktur Utama PT Indonesia Power	S.1151/KSDAE/RKK/KSA.0/9/2022 Tgl 5 Sept 2022	B.21.522/407/UPTD .TAHURA/DKLH dan 059.Pj/060/BLIPGU/ 2022 Tgl 7 Sept 2022	Pembangunan PLTS Terapung 100kWp seluas 3.728,12 m2 di Waduk Muara Nusa Dua Bali yang berada di dalam kawasan TAHURA Ngurah Rai, Bali	PLTS
27	Bali	Dishut dan LH Prov. Bali	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	S.1152/KSDAE/RKK/KSA.0/9/2022 Tgl 23 Sept 2022	B.21.522/415/UPTD .TAHURA/DKLH dan 18.PJ/KS.01/DEI/20 22 Tgl 26 Sept 2022	Pembangunan PLTS Atap 10kWp seluas ±60m2 di Waduk Muara Nusa Dua Bali yang berada di dalam kawasan TAHURA Ngurah Rai	PLTS
<b>Oktober 2022</b>							
28	Jambi	BB TN Kerinci Seblat	SVP-Head of Network Deployment Indosat Ooredoo Hutchion	S.1042/KSDAE/RKK/KSA.0/9/2022 Tgl 21 Sept 2022	Tgl 10 Okt 2022	Pembangunan / Penempatan Jaringan Fiber Optik melintasi TNKS di Ruas Jalan Sungai Penuh - Tapan sepanjang 23 km	Fiber Optik

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
29	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	S.659/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 31 Agustus 2021	No.PKS.5578/K.3/T U/PK/11/2021 - No. HM.05.01-Bb2/2171 Tgl 12 Oktober 2021	Pembangunan Kantilever Jalan Medan - Berastagi di CA/TWA Sibolangit seluas 147,85 m <sup>2</sup> (1,47855 Ha) direvisi menjadi seluas 147,85 m <sup>2</sup> (1,5 m x 97 m) atau 0,0147855 Ha sesuai pertek KSDA Sumut	Jalan
30	Bali	Dishut dan LH Prov. Bali	Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)	S.736/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2021 Tgl 29 Sept 2021	No.522/612/TAHUR A/DKLH/2021 dan No.001.1/KONTRAK /ITDC.ND/X/2021 Tgl 26 Okt 2021	Perpanjangan kerja sama berupa pemanfaatan lahan Kawasan TAHURA Ngurah Rai seluas 20 (dua puluh) hektare sebagai lagoon eksisting untuk kegiatan pengolahan limbah cair, pengolahan air, serta konservasi sumber daya alam dan energi (Instalasi Pengolahan Air Limbah/ IPAL)	IPAL/ Lagoon
<b>November 2022</b>							
31	Riau	Dishut Prov. Riau	VP Corporate Affair PT Pertamina Hulu Rokan	S.1123/KSDAE/RKK/KSA.0/9/2022 Tgl 27 Sept 2022	No.525/KPHP-MT/350 - No.885/PHR-83000/2022/SO Tgl 11-11-2022	Kerja sama sumur eksisting dan sarana penunjangnya di TAHURA Sultan Syarif Hasyim, Riau	Sumur dan Sapras Pendukung
32	Kalimantan Barat	BTN Gn. Palung	Direktur Mega Proyek dan Energi Terbarukan PT PLN (Persero)	S.666/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2022 Tgl 20 Juni 2022	Tgl 25 November 2022	Perpanjangan PKS SUTT 150 kV Ketapang - Sukadana di TN Gunung Palung (7 tower, luas 5,88 Ha)	SUTT 150 kV

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
33	Gorontalo	BTN Bogani Nani Wartabone	Executive General Manager Division (EGM) Planning & Deployment PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	S.1022/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2020 Tgl 3 Desember 2020	No.PKS.1727/BTNB NW/P2/11/2022 No.Tel.3909/PW.13 0/DID- B0400000/2022 Tgl 30 Nov 2022	Kerja sama pembangunan sarana komunikasi berupa jaringan kabel fiber optik bawah tanah Ruas Pemkot Kotamobago-PEMDA Bolaang Mongondow Selatan melintasi TNBNW sepanjang 3.391,89 m di Jalur Trans Sulawesi wil. Doloduo-Molibagu lebar 40 cm kedalam 1,5 m di Kawasan TN Bogani Nani Wartabone	Fiber Optik
<b>Desember 2022</b>							
34	Aceh	Dinas LHK Kota Subulussalam	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	S.601/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021	PKS.002/DLHK.SS/T HR/XII/2022 - PKS.01- Bb1/XII/2022 Tgl 6 Des 2022	Permohonan PKS Penyelenggaraan Jalan Nasional Ruas Kota Subulussalam-Batas Prov. Sumut di TAHURA Lae Kombih sepanjang 2,190 Km	Jalan
35	Aceh	Dinas LHK Aceh	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	S.601/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021	6 Des 2022	Permohonan PKS Penyelenggaraan Jalan Nasional Ruas Lambaro-Batas Pidie Aceh Besar melewati TAHURA Pocut Meurah Intan sepanjang 13,340 Km/13,550 Km lebar 25 m	Jalan
36	Aceh	BKSDA Aceh	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	S.601/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021	23 Des 2022	Pemeliharaan Jalan Nasional Ruas Uwaq (KM 379) - Batas Aceh Tengah/Gayo Lues sepanjang 0,705 Km di Desa Jamur Mesin Kec. Linge Kab. Aceh Tengah di TB Lingga Isaq	Jalan

No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
37	Aceh	BB TN Gunung Leuser	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	S.601/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021	23 Des 2022	Kerja sama Jalan Nasional Ruas Tapak Tuan-Subulusalam 13 Km Kec. Kluet Selatan dan Bakongan Kab. Aceh Selatan dan Ruas Blangkejeren-Kutacane 35 Km Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara di TN Gunung Leuser (TNGL)	Jalan
38	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri PUPR	S.602/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 6 Agustus 2021	23 Des 2022	Peningkatan 7 Ruas Jalan Nasional di CA Batang Pangean I, SM Malampah Alahan Panjang, TWA Air Putih Kelok 9, TWA Mega Mendung, TWA Rimbo Panti, SM Barisan, Sumatera Barat	Jalan
39	Papua	BTN Wasur	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Merauke	S.222/KSDAE/RKK/KSA.0/3/2022 Tgl 18 Maret 2022	21 Des 2022	Kerja Sama Penanganan Jalan Nasional (eksisting), yakni Ruas Jalan Bupul-Erambu-Sota, Ruas Jalan Sota-KM 40 dan Ruas Jalan KM 40-Bts. Kota Merauke sepanjang ±103,24 Km, membentang dari Distrik Sota sampai Distrik Merauke, melintasi Zona Khusus di TN Wasur, Provinsi Papua	Jalan
40	Jawa Barat	BTN Gunung Salak	General Manager UIT JBB	S.1244/KSDAE/RKK/KSA.0/10/2022 Tgl 25 Okt 2022	Tgl 16 Desember 2022	Permohonan PKS Pengoperasian SUTET 500 kV Tasik - Depok di Kawasan TN Gunung Halimun Salak (TNGHS)	SUTET
41	Jambi	Surat Kepala Dinas LH Kab. Batanghari No.660.1/235/THR-STS/DLH/2022 Tgl 25 Juli 2022	Kepala Dinas PUPR Kab Batanghari	S.1045/KSDAE/RKK/KSA.0/9/2022 Tgl 21 Sept 2022	Tgl 22 Desember 2022	Peningkatan Jalan Kabupaten Ds. Senami-Ds Jangga Baru sepanjang 10 km lebar 10 m melintasi Blok Khusus TAHURA Sultan Thaha Syaifuddin Kab. Batang Hari Jambi	Jalan



No.	Provinsi	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
42	DKI Jakarta	BTN Kep. Seribu	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	S.1308/KSDAE/RKK/KSA.0/11/2022 Tgl 10 Nov 2022	Tgl 8 Deseember 2022	Kerja sama Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan di TN Kep. Seribu	Dermaga



SUMBER FOTO & LOKASI : BRSOA SUMATERA SEATAN

## **DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

---

+62 811 971 7035

@ dit.rkk

[dit.perencanaanKK@menlhk.go.id](mailto:dit.perencanaanKK@menlhk.go.id)

Jl. Ir.H.Juanda No. 15;

Jl. Padjajaran No. 79 Bogor